

**PANDANGAN ATAU TANGGAPAN AKHIR  
PESERTA MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA  
TERHADAP PENDIDIKAN PANCASILA  
DI UNPAR**

**Disusun oleh :**

**Sylvester Kanisius Laku, SS., M.Pd.**

**&**

**Andreas Doweng Bolo, SS., M.Hum**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
2010**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbinganNya semata-mata kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul, “Pandangan atau Tanggapan Akhir Peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terhadap Pendidikan Pancasila di UNPAR” ini.

Dasar Pemikirannya adalah bahwa mayoritas mahasiswa mengikuti MK Pendidikan Pancasila karena didorong oleh kebutuhan teknis akan nilai, dsb. Kesadaran untuk mengikuti Pendidikan Pancasila karena kebutuhan yang lebih substansial masih sangat rendah. Karena itu, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan adakah perubahan mendasar berkaitan dengan pandangan atau anggapan mereka terhadap penyelenggaraan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Unpar setelah mengikuti perkuliahan ini selama satu semester?

Kami akui bahwa terselenggaranya penelitian ini berkat kerja sama dan dukungan dari banyak pihak. Karena itu, selayaknya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung penelitian ini, dan terutama kami tujukan kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang mendukung kami dalam bentuk dana untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. I. Bambang Sugiharto yang telah menjadi pengkaji dan penelaah dalam seminar penelitian kami ini.
3. Rekan-rekan sejawat di Pusat Kajian Humaniora Unpar yang telah mendorong dan menyemangati kami, baik melalui nasihat maupun obrolan tentang masalah yang berkaitan dengan fokus penelitian kami.

4. Akhirnya terima kasih juga kepada para mahasiswa yang telah rela memberikan masukan dan pandangannya bagi penelitian ini.

Kami sangat mengharapkan kritikan dan kemungkinan perubahan dan pembaharuan tema, substansi, maupun sistem penelitian maupun penulisan yang lebih baik dan sempurna dari siapa saja yang berkenan.

Bandung, April 2010

Peneliti

## ABSTRAK

Pancasila adalah *philosophische grondslag, weltanschauung* bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah hidup jauh sebelum dirumuskan para pendiri. Maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa Pancasila merupakan inti jiwa bangsa Indonesia. Pancasila bisa juga dikatakan sebagai kerangka pandang orang Indonesia melihat dirinya. Perjalanan sejarah bangsa seharusnya menjadikan Pancasila semakin terbuka untuk dibicarakan. Pancasila yang sudah dirumuskan itu harus terus ditafsirkan dalam konteks Indonesia yang berubah. Dengan demikian, ia menjadi semakin hidup dan kaya makna karena menjadi milik seluruh komponen bangsa.

Kesan yang muncul di awal perkuliahan berhadapan dengan perkuliahan Pendidikan Pancasila adalah negatif. Mayoritas mahasiswa menganggap dan memandang mata kuliah Pendidikan Pancasila sekadar menjadi ideologi yang melayani kehendak penguasa. Model pendidikan yang indoktrinatif merupakan salah satu cara yang kerap digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga cenderung represif. Karena itu, kecurigaan bahwa Pendidikan Pancasila merupakan sebuah upaya manipulasi dalam kerangka tafsir kelompok yang berkuasa. Sehingga menurut mayoritas mahasiswa Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini tidak lagi memiliki daya atau kekuatan mempengaruhi sehingga mempelajarinya pun sekedar sebuah tuntutan teknis-akademis.

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang masih setia pada sejarah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi merasa selalu terpanggil untuk mencoba merumuskan ulang Pancasila. UNPAR sebagai sebuah universitas yang mendasari diri pada spirit multi-kultur dan muliti-religi menjadikan Pancasila sebagai falsafah. Hal ini pula yang membuat Mata Kuliah Pendidikan Nilai Pancasila tetap dipertahankan di kampus ini. Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis sejauh mana mahasiswa UNPAR menyadari spirit ini.

Salah satu komponen penting dinamika pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa. Maka penelitian ini mencoba menggali pendapat akhir peserta

mata kuliah. Pandangan atau pendapat ini berhubungan dengan pengalaman mereka mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila selama satu semester. Dalam penelitian ini ada tiga pendapat yang coba digali diantara mahasiswa peserta mata kuliah. Ketiga pendapat itu berkaitan dengan pertama, pendapat akhir tentang materi; kedua, pendapat akhir terhadap metode yang digunakan; ketiga, pendapat akhir terhadap dosen atau pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Pendapat akhir mahasiswa ini yang kemudian ditangkap dan dianalisis sehingga akhirnya pendapat akhir dari peserta didik ini memperkaya pengembangan mata kuliah ini. Sehingga sebagai falsafah bangsa Pancasila tetap hidup dalam hati, pikiran dan tindakan manusia Indonesia pada umumnya dan civitas academica UNPAR pada khususnya.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	ii
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Kerangka Teoritis .....	4
E. Hipotesis .....	5
F. Metodologi .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS DAN PERSPEKTIF YANG</b>	
<b>DIGUNAKAN</b> .....	7
A. Dimensi sosio-historis Pancasila .....	7
B. Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila .....	14
C. Pancasila sebagai Ideologi .....	24
<b>BAB III : DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	27
A. Data Responden Penelitian .....	27
B. Pandangan Akhir Responden Terhadap.....	27
1. Pandangan Akhir Responden Terhadap Materi.....	28
2. Pandangan Akhir Responden Terhadap Metode Kuliah.....	34
3. Pandangan Akhir Responden Terhadap Dosen .....	40
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Pandangan Atau Tanggapan Responden terhadap Materi Pendidikan Pancasila .....	48
B. Pandangan Responden Terhadap Metode kuliah Pendidikan Pancasila .....	54
C. Pandangan Atau Tanggapan Responden Terhadap Dosen MK Pendidikan Pancasila .....	63
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran / Rekomendasi.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
Lampiran-lampiran .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuan, sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila.

Dalam Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Jakarta (2003 : 164) disebutkan bahwa tujuan pembelajaran umum dari Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah melahirkan mahasiswa yang dapat memiliki pengetahuan dan memahami landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila. Selain itu agar mahasiswa mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai Paradigma dalam kehidupan kekarwaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, sehingga memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis pada mereka dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pembinaan dan pengembangan kepribadian mahasiswa yang berkarakter kebangsaan juga menjadi perhatian dan fokus kajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi demi terciptanya komunitas masyarakat Indonesia yang bersaudara.

Menurut Warlim Isya (2003 : 39), tujuan Pendidikan Pancasila dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan, untuk mengkaji nilai-nilai social-budaya bangsa yang terangkum dalam rumusan sial-sila Pancasila tersebut. Dari upaya ini, diharapkan

terbentuknya kepribadian manusia (mahasiswa) yang tidak saja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial-bermasyarakat.

Karena itu, Pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sasaran terakhir dari Pendidikan Pancasila adalah dipahami, dihayati dan diamalkan Pancasila oleh setiap peserta didik di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karena Pendidikan Pancasila ternyata diberikan pada setiap tingkat dan jenjang pendidikan formal, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat dicerna dan diterima peserta didik menurut tingkat pengalaman dan perkembangan penalarannya. Dalam setiap jenjang perkembangannya, diharap peserta didik mampu menemukan relevansi nilai-nilai Pancasila bagi kehidupannya, sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Menanggapi pentingnya membangun karakter kebangsaan (*nation character building*) dalam pribadi mahasiswa, maka Unpar sebagai sebuah lembaga Pendidikan Tinggi melalui Pusat Kajian Humaniora, menyelenggarakan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila sebagai salah satu Mata Kuliah Umum, sekalipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, menghapus Pendidikan Pancasila dari sistem kurikulum Pendidikan Tinggi dan mengintegrasikannya ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini bertujuan agar terciptanya pribadi-pribadi yang sesuai dengan prinsip dan nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, memiliki integritas nasional yang tinggi, mengakui kesamaan dan kesetaraan, dan mampu bersikap adil. Selain bahwa sebagai mahasiswa mereka diharapkan juga mampu bersikap kritis terhadap segala bentuk nilai dan ideologi yang ditawarkan dalam masyarakat yang kian kompleks.

## **B. Rumusan Masalah Dan Pertanyaan Penelitian**

Persoalan mendasar yang sering menjadi kendala pembelajaran Pancasila adalah kurang menariknya materi dan metodologi yang digunakan. Berdasarkan



penelitian awal yang kami lakukan terhadap peserta mata kuliah Pancasila, mayoritas mempersepsikan MK Pendidikan Pancasila secara negatif. Dalam pengertian mayoritas mahasiswa memandang Pendidikan Pancasila terlalu bermuatan teoretis-filosofis, tidak menarik, dsb. Sementara itu berkaitan dengan metode mayoritas juga mengatakan metode yang digunakan dalam Pendidikan Pancasila terlalu kaku, tidak luwes, dan cenderung membosankan.

Persepsi awal yang kami gambarkan di atas, melalui penelitian ini akan coba kami komparasikan dengan pendapat atau tanggapan peserta mata kuliah Pancasila di akhir perkuliahan dalam satu semester. Persoalan mendasar yang hendak kami temukan dan kemukakan melalui penelitian ini adalah adakah perubahan pandangan maupun sikap secara prinsip dan mendasar terhadap Pendidikan Pancasila. Terutama terhadap dua hal mendasar dalam Pendidikan Pancasila, yaitu Materi dan metodologinya.

Ada dua hal mendasar yang menjadi alasan mahasiswa mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertama, karena diwajibkan oleh universitas atau fakultas sehingga tidak memiliki lagi peluang untuk memilih. Kedua, karena dan demi nilai. Berdasarkan asumsi di atas kami merumuskan persoalan penelitian ini dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa pandangan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila terhadap materi Pendidikan Pancasila di Unpar?
2. Apa pandangan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila terhadap metode yang digunakan dalam Pendidikan Pancasila di Unpar?
3. Apa pandangan mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila terhadap dosen / pengajar Pendidikan Pancasila di Unpar?

### **C. Tujuan dan kegunaan**

1. Memahami pendapat akhir mahasiswa terhadap materi Pendidikan Pancasila.
2. Memahami pendapat akhir mahasiswa terhadap metode Pendidikan Pancasila.
3. Memahami pendapat akhir mahasiswa terhadap dosen MK Pendidikan Pancasila.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu bentuk pendidikan nilai bermaksud membangun sebuah paradigma berpikir yang lebih komprehensif mengenai identitas manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila bila dikaji secara filosofis akan menampakkan sebuah benang merah mengenai bagaimanakah manusia Indonesia menempatkan dirinya dalam ruang publik yang disebut Indonesia. Itu berarti dengan memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terbangunlah sebuah karakter kebangsaan yang terwujud dalam pribadi setiap anak bangsa. Maka melalui pendidikan Pancasila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat ditanamkan dalam setiap pribadi mahasiswa secara pedagogis.

Selain itu, Pendidikan Pancasila merupakan bentuk kajian terstruktur dan sistematis tentang fenomena hidup bangsa dan Negara Indonesia sebagai ruang publik. Nilai berkebangsaan Indonesia dapat tertanam melalui pendidikan Pancasila yang tujuannya adalah membangun kepribadian manusia Indonesia yang utuh, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Dengan demikian Pendidikan Pancasila mengajak mahasiswa menilai realitas ruang publik sehari-hari secara mandiri dengan panduan nilai-nilai etis Pancasila tersebut.

Perkaranya kini adalah pendidikan Pancasila sebagai sebuah subyek ilmu yang diajarkan secara formal kepada mahasiswa sudah semakin kehilangan “kepercayaan” dan cenderung dipandang sebelah mata. Apalagi ada anggapan bahwa apa yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dunia kerja. Lebih lagi, berkembang juga anggapan bahwa materi Pendidikan Pancasila itu terlalu rumit dan filosofis sehingga sulit untuk dipahami apalagi ditunjang dengan metode pengajaran yang membosankan. Karena itu, pemahaman terhadap Pendidikan Pancasila sejak dini (sebelum mengikutinya), baik menyangkut materi maupun metode pengajarannya, sangat minim bahkan terkesan tidak penting. Mahasiswa cenderung menjalani begitu saja, apalagi Pendidikan Pancasila bukanlah sesuatu yang hakiki dan

seringkali diikuti sebagai sesuatu yang teknis semata karena kebutuhan kurikulum, bukan karena kesadaran pribadi.

Pandangan semacam itu memang cukup beralasan bila melihat sejarah proses Pendidikan Pancasila yang terkesan terjadi secara indoktrinatif. Dampaknya adalah berkembang anggapan yang mencuat kemudian bahwa pendidikan Pancasila adalah akal-akalan pemerintah demi kepentingan dan *status quo* belaka. Padahal bila dikaji secara mendalam Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat mengandung nilai-nilai luhur yang tak diragukan lagi dapat menciptakan sebuah kohesi sosial bangsa Indonesia yang sangat kuat. Dalam kaitan dengan ini Pancasila merupakan *way of life, way of thinking, way of view*, atau *welthanschauung* masyarakat Indonesia.

#### **E. Hipotesis**

Mahasiswa peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila semestinya memiliki pemahaman yang minimal tentang apa itu Pendidikan Pancasila, baik menyangkut isi / materi, metode pengajaran, dan pengajarnya. Apalagi Pendidikan Pancasila di Unpar merupakan salah satu Mata Kuliah wajib universitas sehingga sehingga memahami apa itu Pendidikan Pancasila merupakan sesuatu yang perlu.

#### **F. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada proses yang pada akhirnya menemukan makna dari subyek (mahasiswa) yang diteliti. Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis untuk menemukan inti persoalan di seputar persepsi mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila. Selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan untuk menemukan solusi terhadap persoalan di atas.

Metode pengumpulan data yang ditempuh adalah melalui *penyebaran angket* dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Angket yang disebar memuat tiga aspek penting penelitian ini, yaitu mengenai materi Pendidikan Pancasila, Metode yang digunakan dalam proses perkuliahan, dan dosen yang mengajar Pendidikan Pancasila. Ketiga aspek penelitian tersebut dikemas dalam sembilan pertanyaan dimana masing-masing aspek mengandung tiga pertanyaan penting. Penyebaran

angket dengan sembilan pertanyaan tersebut bermaksud untuk mendapatkan masukan berupa informasi di seputar persepsi akhir mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila. FGD akan memfokuskan perhatian pada pendalaman dan penajaman penelitian. Melalui FGD peneliti bermaksud mengumpulkan informasi sekunder yang akan memperkuat hipotesis dan temuan penelitian melalui sebaran angket penelitian. FGD diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang persepsi akhir mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila dan kesulitan-kesulitan apa saja yang mahasiswa alami (pada tataran persepsi) berhadapan dengan Pendidikan Pancasila

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS DAN PERSPEKTIF YANG DIGUNAKAN

#### A. Dimensi sosio-historis Pancasila

Dalam bagian ini Pancasila akan ditelaah dalam berbagai periode sosio-historis bangsa Indonesia. Pembagian ini memudahkan kita untuk menyelami Pancasila dalam berbagai pergulatan filosofis-ideologis.

#### 1. Periode 1945 - 1955

Kemerdekaan menjadi perjuangan rakyat terjajah, kaum Bumi Putera, rakyat Hindia Belanda yang berada dalam imperealisme dan kolonialisme. Bagi Indonesia usaha menuju kemerdekaan itu menjadi upaya perjuangan yang panjang. Munculnya tokoh-tokoh terdidik seperti Sukarno, Hatta, Muh. Yamin, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, Radjiman Wedyodiningrat dll memberi arah baru perjuangan. Kesadaran akan ketertindasan dan keterjajahan melahirkan rasa nasionalisme. Suatu rasa yang bergejolak di wilayah-wilayah terjajah seperti di Asia, Afrika, Amerika Latin untuk merdeka, bebas dari keterjajahan.<sup>1</sup> Hal itu jelas terlihat misalnya dalam pidato Muh. Yamin dimana ia mengatakan bahwa kegembiraan memberi sumbangan rohani itu adalah pula sepadan dan selaras dengan keinginan rakyat: *“Mau merdeka” dan “ingin bernegara berkedaulatan”*.<sup>2</sup> Demikian juga Sukarno berapi-api bicara tentang kemerdekaan. Rupanya mulai ada banyak perbedaan dalam sidang pertama kemerdekaan. Hal yang juga dikatakan Moh. Hatta dalam kesaksiannya yakni bahwa pada hari

---

<sup>1</sup> Bdk. Anthony D. Smith, *Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah*, hlm. 10-11

<sup>2</sup> Lihat. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, hlm. 8

ketiga perbedaan ideologis menjadi cukup tajam.<sup>3</sup> Maka Sukarno kembali mengingatkan tentang tujuan semula yakni kemerdekaan. Sukarno dalam pidato 1 juni 1945 itu tegas mengatakan: “Jangan kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau menyelesaikan lebih dulu 1001 soal yang bukan-bukan! Sekali lagi saya bertanya: Mau merdeka apa tidak? Mau medeka apa tidak? (*Jawab hadirin: Mau*).<sup>4</sup> Sambutan hangat dan tepuk tangan meriah dari para hadirin mengindikasikan pertarungan ideologis begitu kuat dan Sukarno sanggup merumuskan secara brilian sebuah dasar bersama yang bisa menampung berbagai pertarungan ideologis itu.<sup>5</sup>

Dalam usaha ingin mencapai kemerdekaan itu kebangsaan<sup>6</sup> menjadi cita-cita para pendiri negeri ini. Cita-cita kebangsaan sebagai dalam ikatan yang erat satu dengan yang lain ini rupanya telah menjadi spirit sejak awal. Muh. Yamin jelas mengatakan bahwa negara kebangsaan berdasarkan peradaban dan kekeluargaan. “Negara baru yang akan kita bentuk, adalah suatu Negara kebangsaan Indonesia atau suatu nationale staat atau suatu Etaat national yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan.”<sup>7</sup> Muh. Yamin melanjutkan, “Negara Republik Indonesia yang diingini oleh bangsa Indonesia sebagai Negara ketiga dalam perjalanan sejarah, ialah suatu Negara kebangsaan Indonesia, suatu etat national.<sup>8</sup> Keutuhan dengan konstitusi yang tertata ini menjadi cita-cita Muh. Yamin yang senantiasa didengungkan maka tak heran Denny Indrayana memandangnya sebagai pendiri yang sangat berjasa.<sup>9</sup>

Cita-cita mendirikan negara persatuan sebagai bangsa juga menjadi dasar pemikiran Supomo. Pada pidatonya 31 Mei 1945, ia menguraikan secara panjang

---

<sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, *Apirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, hlm. 59.

<sup>4</sup> Lih. Pidato Sukarno, hlm. 61. Lihat juga, Sukarno, Tjamkan Pantja Sila- Pantja Sila Dasar Falsafah Negara, hlm 15. Sesudah menyakinkan bahwa kemerdekaan menjadi unsur fundamental baru setelah itu Sukarno menguraikan tentang hal dasar.

<sup>5</sup> Lihat Adnan, hlm. 61

<sup>6</sup> Bangsa dalam kategori ini dipahami sebagai komunitas yang menekankan ikatan yang erat antar anggota. Benedict Anderson secara cermat mengatakan sebagai komunitas terbayang. Bangsa dalam pengertian ini yang dimaksud.

<sup>7</sup> Sekretariat Negara, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara, *op. cit.*, hlm. 11

<sup>9</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945-Antara Mitos dan Pembongkaran*, hlm. 50

lebar hakekat sebuah bangsa dan bentuk cikal bakal negara yang akan didirikan. Persatuan menjadi hal yang fundamental untuk negara. Baginya rakyat dan pemimpin harus bersatu serta berbagai golongan di negeri ini harus bersatu berdasarkan semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Baginya corak dasar negara haruslah sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang disebutnya sebagai Negara Integralistik. “Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, negara yang *bersatu dengan seluruh rakyat*, yang mengatasi *seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun*.<sup>10</sup> Demikian juga Sukarno berbicara tentang bangsa dalam artian persatuan semua unsur yang ada di negeri ini.

*Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar suatu golongan orang yang hidup dengan “ le desir d’etre ensemble” di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis tetapi bangsa Indonesia adalah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang ditentukan oleh Allah s.w.t., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera damapi ke Irian.*<sup>11</sup>

Maka Sukarno menempatkan “kebangsaan” sebagai yang pertama untuk Indonesia merdeka. “ Dasar negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat.”<sup>12</sup>

Bila dicermati secara maka dua pidato pertama pidato ini lebih menitikberatkan pada paham kebangsaan dengan persatuan sebagai kekeluargaan bangsa Indonesia. Belum tampak jelas pergulatan ideologi yang tajam. Bandingkan dengan kesaksian Hatta, baru pada hari ke tiga, perbedaan tajam ideologi tampak. Pidato Sukarno 1 Juni 1945 disambut dengan tepuk tangan dengan perasaan lega barangkali karena pemikiran ini sanggup mendamaikan

---

<sup>10</sup> Sekretriari Negara, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>11</sup> Soekarno, *Tjamkanlah Pantja Sila*, hlm. 22

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 23

kepetingan ideologis yang ada dalam anggota sidang waktu itu. Pidato ini penting karena dalamnya ideologi negara dirumuskan secara konkret. Dan pada tanggal 1 Juni, Pancasila sebagai istilah muncul dari Sukarno. Pada pidato ini Sukarno menguraikan tentang kemerdekaan yang harus segera diraih dan tentang dasar Negara (*philosofische grondslag*). Dalam uraian ini Sukarno memberi nama Pancasila. “Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abdi.”<sup>13</sup>

Ini berarti kata Pancasila baru ada tanggal 1 Juni 1945. Namun dalam perjalanan Pancasila tak lagi dibicarakan. Dalam UUD 1945 pun nama Pancasila tak disebut. Kelima sila tetap dimasukkan tanpa menyebut judul Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Bila kita mencermati sidang pada sehari setelah kemerdekaan yakni sidang pengesahan Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar negara tak ada perdebatan lagi mengenai kata Pancasila. Ki Bagus Hadikusumo memang menyinggung soal tata susunan kalimat yang berkaitan dengan lima poin tersebut sambil tidak lagi membicarakan tentang Pancasila ideologi negara. Maka dapat dikatakan bahwa sebagai istilah Pancasila hanya muncul di tanggal 1 Juni. Baru ditahun-tahun berikutnya Sukarno kembali mengangkat lagi istilah Pancasila. Ideologi Pancasila dipertentangkan dengan ideologi Islam. Pertaruhan itu begitu terbuka jelang pemilu, sesudah pemilu dan ketika Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin dipandang sebagai kemenangan ideologis Pancasila. Kemenangan ini kemudian membawa Pancasila sebagai ideologi mendominasi wacana kenegaraan. Sampai pada zaman Orde Baru, yang masih mengedepankan Pancasila dan ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

## **2. Periode 1955-1959**

Pada era ini pertarungan antar ideologi begitu tajam dan terbuka antar faksi. Hal ini bisa terlihat dari corak partai politik yang ada, yakni berdasarkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 69



ideologi agama, ideologi kebangsaan dan ideologi sosialisme. Pada bagian ini akan disebut dan dijelaskan beberapa ideologi partai politik sebagai wujud konkret pertarungan tersebut.<sup>14</sup>

Pertama, partai dengan ideologi agama yakni Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI). Partai Masyumi yang mengusung ideologi agama mempunyai tujuan: *pertama*, menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam; *kedua*, melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Partai Syarikat Islam mempunyai enam pokok asas yaitu: *pertama*, persatuan dalam ummat Islam, *kedua*, kemerdekaan ummat (nationale vriheid), *ketiga*, sifat kerajaan (negar1) dan pemerintahan, *keempat*, penghidupan ekonomi, *kelima*, keadaan dan derajat manusia didalam pergaulan hidup dan didalam hukum dan *keenam* kemerdekaan yang sejati. Partai Katolik dengan dua asas dan tujuan. *Pertama*, Partai Katolik berdasarkan Ke-Tuhanan yang Mahasa Esa pada umumnya serta Pancasila pada khususnya dan bertindak menurut azas-azas Katolik. *Kedua*, tujuan Partai Katolik ialah bekerja sekuat-kuatnya untuk kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat.

Partai-partai dengan ideologi kebangsaan seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Persatuan Indonesia (PIR), Partai Rakyat Indonesia. PNI didalam Anggaran Dasar pasal 2 menyatakan bahwa Asas Partai Nasional Indonesia ialah: Sosio-nasional-demokrasi (Marhaenisme). PIR dalam anggaran dasar pasal 2 juga mengatakan bahwa: Partai berdasarkan paham: Kebangsaan, Kerakyatan, dan Peri Kemanusiaan. Partai Rakyat didalam pasal 2 anggaran dasar menyatakan bahwa Partai Rakyat Indonesia berasakan Pancasila.

Partai-partai dengan ideologi sosialisme seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba. PKI berazaskan Marxisme-Lenisisme ingin membentuk masyarakat sosialis di Indonesia. Partai Sosialis Indonesia berdasarkan ilmu pengetahuan Marx- Engels. Partai Murba menyatakan

---

<sup>14</sup> Untuk penjelasan ideologi partai Bdk. A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, hlm.101-129

bahwa Partai berazaskan anti fascisme, anti imperialisme, anti kapitalisme dan mendasarkan perjuangan pada aksi murba sejati.

Pertaruhan ideologis ini menjadi konkret pada pemilu 1955 yang diikuti oleh 34 partai dengan PNI, Masyumi, NU dan PKI sebagai partai besar. Dari Pemilu terpilih 514 anggota kostituante. Selain itu ada 30 orang wakil dari golongan minoritas terdiri atas 12 wakil keturunan Cina, 12 wakil Indo-Eropa, dan 6 yang mewakili wilayah yang diduduki Belanda, yaitu Irian Barat, yang semuanya termasuk Blok Pancasila.<sup>15</sup>

Perdebatan mengenai kerangka ideologis membuat masing-masing kelompok tidak mau beranjak dari pola pandang masing-masing. Bagi faksi Islam, dasar pemikiran yang paling penting ialah wahyu Ilahi yang terkandung dalam Al-Quran serta teladan dan sabda Nabi Muhammad yang terdapat dalam hadis. Bagi faksi Pancasila, dasar pemikiran yang terpenting ialah kesatuan rakyat Indonesia berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perumusan Pancasila. Dan bagi Sosio-Ekonomi, dasar pemikiran yang terpenting ialah semangat revolusioner Proklamasi 1945. Masing-masing faksi berargumentasi dalam kerangka sendiri maka terjadi perdebatan yang sengit. Ada polarisasi dan permusuhan yang semakin tajam.<sup>16</sup>

Perdebatan ini menjadi panjang dan bertele-tele sehingga melupakan tekad yang sudah ada yakni untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia. Rupanya semangat zaman itu yakni perkara ideologi membuat para pelaku sejarah negeri ini baik di tahun 1945 dan dalam sidang konstituante tak bisa keluar dari arus besar ideologi.<sup>17</sup> Bagi Adnan Buyung Nasution perdebatan yang menjurus ke absolutisme pemikiran ini membuat kerja utama yakni menyelesaikan dasar negara.<sup>18</sup> Sutan Takdir Alisjabana (PSI) sastrawan terkemuka negeri ini mencoba melihat secara berbeda makna dasar guna mencairkan absolutisme pemikiran yang ada saat itu.

---

<sup>15</sup> Ibid., Adnan hlm. 34

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 85

<sup>17</sup> Karena begitu kuat arus ideologi ini maka dibagian ke tiga dalam sub ini akan dibahas secara khusus Pancasila dan kaitannya dengan ideologi.

<sup>18</sup> Adnan, hlm. 67

*Kata dasar seperti kita pakai dalam hubungan dengan negara adalah suatu kiasan. Suatu metafora, sekedar untuk menolong pengertian kita. Kata dasar itu bukan sesungguhnya berarti seperti dasar suatu gedung, yang menentukan mungkin atau tidaknya suatu gedung berdiri. Kata dasar itu hanya memberi kita pedoman, patokan, pikiran-pikiran, yang pada umumnya akan dapat memberi pegangan sekedarnya dalam pemikiran dan perbuatan dalam lingkungan negara<sup>19</sup>*

Rupanya pandangan STA ini tak mengendorkan ketegangan tentang konsep dasar negara dan masing-masing ideologi kekeh pada pendirian. Hal ini membuat pemerintah mempunyai alasan untuk mengintervensi sidang. Sebuah tindakan yang membawa negeri ini kesejarah kediktoran baik pada zaman Sukarno maupun Suharto.

Pemerintah tiga kali mengintervensi sidang konstituante. Intervensi yang pertama melalui pidato Perdana Menteri Djuanda, kedua amanat Sukarno tentang usul kembali ke UUD 1945 yang ditolak oleh anggota konstituante. Intervensi pemerintah yang ketiga, berupa Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Sukarno ragu untuk mengintervensi konstituante namun karena tekanan dari pihak militer dalam hal ini Nasution maka Sukarno mengeluarkan dekrit tersebut.<sup>20</sup> Ini berarti Indonesia menjadi negara yang Pancasila dalam artian juga Negara yang sarat bermuatan ideologis. Dalam kerangka ini Pancasila menjadi kerangka yang mempertegas langka itu. Maka dapat dikatakan bahwa dengan dekrit tersebut Pancasila sebagai ideologi keluar sebagai pemenang. Ideologi-ideologi lain kemudian tak tumbuh karena kekuasaan tidak segan-segan menindak yang berbeda dengan ideologi bangsa dengan Pancasila sebagai dasarnya.

---

<sup>19</sup> Sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution, hlm. 68

<sup>20</sup> Lih. Adnan, hlm. 312

## **B. Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila**

Sebagaimana dikatakan di atas dalam dua era ini Pancasila menjadi wacana tunggal yang menguasai jagat berpikir, bertindak, berpolitik negeri ini. Maka dua era ini perlu ditelaah secara kritis dan rasional. Kekritisannya ini penting agar telaahan ini tidak terjebak lagi dalam jargon-jargon ideologis belaka. Dimana yang dibicarakan yaitu suatu negara yang ideal. Sebuah pemikiran yang mustahil, maka tepat sebagaimana dikatakan Adnan Buyung Nasution: “Tujuan terbatas konstitusi juga harus diakui sebagai penataan negara dan pengendalian kekuasaan. Tujuannya bukan untuk menciptakan negara ideal. Inilah asumsi faksi-faksi Islam dan Pancasila yang keliru, disamping pandangan integralistik pada tahun 1950.”<sup>21</sup> Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara perlu ditelaah secara terus menerus agar ia tak menjadi dasar ideologis yang menghancurkan tatanan hidup bersama.

### **1. Demokrasi Terpimpin**

Setelah Dekrit 5 Juli 1959 arah kediktatoran itu mulai tampak melalui Demokrasi Terpimpin. Meskipun Sukarno dalam berbagai pernyataan termasuk dalam kuliahnya tentang Pancasila atau melalui orang-orang dekatnya seperti Ruslan Abdulgani mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila bukan diktator. Secara teoritis Sukarno mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin bukan diktator namun merupakan lawan demokrasi liberal. Ia adalah demokrasi karya untuk melaksanakan pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sukarno juga menandakan bahwa masyarakat adil dan makmur tidak dapat dibangun dengan demokrasi yang berdasarkan *free fight liberalism*, melainkan hanya dengan suatu demokrasi terpimpin dengan sistematis dan terencana menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>22</sup> Dekrit ini berimplikasi mulai diaturnya kehidupan berbangsa termasuk didalamnya pengaturan yang ketat terhadap ideologi. Bila sebelumnya Pancasila diwacanakan secara terbuka oleh partai-partai dalam konstituante, setelah dekrit hanya ada satu garis ideologi yang dikendalikan oleh kekuasaan.

---

<sup>21</sup> Lihat Adnan, hlm. 436

<sup>22</sup> Ruslan Abdul Gani, *Pancasila sebagai Landasan Demokrasi Terpimpin*, dalam Bung Karno dan Pancasila-Menuju Revolusi Nasional, hlm. 272-273

Cita-cita dengan satu partai ini merupakan pemikiran Sukarno sejak muda. Perpecahan dalam Sarikat Islam (SI) dipandang sebagai pengalaman yang membuat Sukarno senantiasa memimpikan satu partai tunggal yang mengatur kehidupan bangsa. Pemikiran ini semakin menguat setelah pemilu 1955 dimana PSI dan Masyumi dua partai yang sebelum pemilu dipandang besar ternyata mendapat dukungan yang lebih kecil daripada yang dibayangkan. Maka Sukarno dengan dukungan PKI dan beberapa partai yang bersebelahan dengan PSI dan Masyumi menyerang kedua partai ini. Di tahun 1956 Sukarno telah berkeinginan untuk menguburkan partai-partai.<sup>23</sup> Sebuah keinginan yang kemudian terlaksana dengan Dekrit 5 Juli 1959.

Dekrit tersebut kemudian diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada sentralisasi ideologi. Hal ini terbukti dengan ditetapkan dasar-dasar kehidupan kepartaian tanggal 31 Desember 1959:<sup>24</sup>

- a. harus menerima dan membela konstitusi dan Pancasila
- b. menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik
- c. menerima bantuan dari luar negeri hanya seizin pemerintah
- d. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai
- e. Presiden berhak membubarkan partai politik.

Imbas dari peristiwa dekrit ini dan segala peraturan yang mendukungnya maka pada bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.<sup>25</sup> Suatu tindakan yang memacetkan demokrasi bahkan lebih dari itu tidak demokratis. Mohammad Natsir tokoh terkemuka Islam merupakan penentang paling vokal Demokrasi Terpimpin. Ia menganggap Sukarno tidak demokratis dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini. Kritik ini tidak hanya datang dari partai dan kelompok yang berseberangan dengan Sukarno. Presiden Nixon juga memberi kritik terhadap Sukarno, ia

---

<sup>23</sup> Bernard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, hlm. 406

<sup>24</sup> Bdk. Pranarka, hlm. 175

<sup>25</sup> Bdk. Pranarka hlm. 175

mengatakan: “Sukarno adalah contoh terbaik yang saya kenal tentang seorang pemimpin revolusioner yang dengan ahlinya mampu menghancurkan suatu sistem, tetapi tidak bisa memusatkan perhatian untuk membangunnya kembali.”<sup>26</sup> Sukarno tidak menghiraukan kritik-kritik ini sehingga diakhir masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia hampir bangkrut.<sup>27</sup>

Persoalan ideologis tak boleh diwacanakan, suara-suara yang menentang kekuasaan dibungkam. Di bawah Demokrasi Terpimpin situasi kesewenangan itu menjadi sesuatu yang legal dalam pengertian diatur secara yuridis. Dekrit Presiden No.11/1963 tentang pemberantasan subversi dengan hukum mati bagi pelaku menempatkan presiden sang Pemimpin Besar Revolusi dengan kekuasaan yang begitu besar. Bahkan bisa mengintervensi yudikatif dan legislatif.<sup>28</sup> Akhir dari penumpukan kekuasaan ini membuat Sukarno terjungkal. Kekuasaannya berakhir dan diganti oleh seorang Jendral yang tidak begitu terkenal kala itu Suharto.

## **2. Demokrasi Pancasila**

Bila dicermati secara jeli, format dan praksis Demokrasi Pancasila tak jauh berbeda dengan format dan praksis Demokrasi Terpimpin. Maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila sebenarnya merupakan Demokrasi Terpimpin jilid II. Jikalau dulu pimpinan tertingginya adalah Sukarno didukung Angkatan Darat (AD), maka sekarang pimpinannya adalah Suharto dengan tetap mendapat dukungan dari AD. Bahkan bisa dikatakan bahwa praktik Demokrasi Terpimpin itu sempurna di pemerintahan Suharto. Adnan Buyung Nasution juga mengatakan bahwa kegembiraan atas jatuhnya Sukarno hanya bertahan sampai dengan 1970. Dimana setelah tahun itu diambil langkah-langkah untuk mengekang pers, dan beberapa surat kabar yang kritis terhadap Angkatan Bersenjata dan pemerintah. Kegiatan partai politik yang menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi dibatasi.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sebagaimana dikutip Herbert Feith dan Lance Castles (eds), *Indonesian Political Thinking: 1945-1965*. Saya kutip pernyataan tersebut dari Maarif, hlm. 134

<sup>27</sup> Maarif, hlm.134.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 430-31 (untuk fanatisme ideologi juga. lih MAarif. 124)

<sup>29</sup> Adnan, hlm. 408

Banyak buku dan penelitian yang bicara tentang era ini, dimana Suharto naik dengan kudeta merangkak dalam istilah “Ben Anderson”. Awalnya Suharto tampil sebagai tokoh yang demokratis namun rupanya ini tak bertahan lama sebagaimana dikatakan di atas. Kekuasaan itu merusak bila tak diimbangi sistem kontrol sebagaimana mantra Lord Acton, “*Power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely*”. Sebenarnya bila ditelusuri lebih dalam teror ini sudah dibangun begitu Sukarno tumbang dengan pembunuhan secara terorganisir mereka yang dianggap/dituduh PKI.<sup>30</sup> Suharto secara keras menerapkan sistim represif. Ia membangun kekuasaan di atas teror menakutkan yang mengorbankan begitu banyak nyawa. Teror itu dilakukan kepada mereka yang dianggap penguasa sebagai komunis (PKI) termasuk simpatisan bahkan siapa saja yang dituduh secara serampangan sebagai komunis.<sup>31</sup> Perkiraan tentang jumlah korban, 150.000 menurut *New York Times* sedangkan menurut *The economist* 1.000.000 orang.<sup>32</sup> Teror negara<sup>33</sup> ini senantiasa menjadi hantu yang menakutkan bagi siapa saja yang bicara benar tentang kekuasaan yang koruptif, represif dan penuh dengan kolusi serta nepotisme. Dalam sejarah kita bisa melihat sekian banyak korban berjatuhan karena mereka dipandang “tidak Pancasila”. Mantra yang begitu dipuja di zaman Orde Baru dengan satu pandangan tentang Pancasila yakni dari penguasa. Untuk semakin memantapkan cengkraman ideologis, Suharto dan ordenya mencanangkan sekian banyak istilah, strategi yang semakin menindas hak-hak rakyat.

Ada sekian banyak yang bisa diuraikan namun untuk kepentingan penelitian ini, kami hanya menelaah dua upaya sistimatis yang membungkam itu yakni strategi Orde Baru di bidang politik dan pendidikan. Represi di bidang politik memaksa orang/rakyat untuk memahami negeri ini bukan dalam kerangka pluralitas tetapi uniformitas. Sedangkan kontrol terhadap dunia pendidikan menjadikan pendidikan menjadi ajang pembodohan. Cita-cita mencerdaskan

---

<sup>30</sup> Kesaksian ini bahwa pembunuhan itu terjadi secara terorganisir tersebut lihat, Baskara T. Wardaya,...

<sup>31</sup> Lhat kisah dalam Baskara.

<sup>32</sup> Sebagaimana dikutip juga oleh Adnan Buyung, hlm. 431

<sup>33</sup> Teror negara ini kemudian diteruskan dan dipelihara dalam berbagai kasus yang terjadi di negeri ini. Lih. Tempo... atau buku tentang tentara... Lihat Ignas....

kehidupan bangsa sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 tinggal jargon kosong belaka.

#### **a. Politik**

Politik dalam hal ini berkaitan dengan segala dimensi publik atau hidup bersama atau dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut “politik” adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>34</sup>

Di zaman Demokrasi Pancasila, masa mengambang menjadi ciri politiknya. Rakyat dipaksa menjadi a-politik bahkan anti-politik. Sementara itu di lain pihak rakyat diwajibkan (baca: dipaks1) untuk melakukan tindakan yang sejalan dengan kehendak rezim. Yang berbeda di ruang publik dipandang pengacau, pemecah belah sehingga digolongkan sebagai penjahat, setan sehingga kalau dihabisi pun tak menjadi masalah. Efektivitas teror yang dipraktekan diawal pemerintahan menjadi begitu ampuh membungkam siapa saja yang bebas bersuara apalagi menentang rezim.

Salah satu indikasi bahwa politik itu dijalankan dengan bebas yaitu dibuka ruang untuk tumbuhnya partai-partai politik. Namun di zaman Suharto pertumbuhan ini dibekukan, dimatikan. Pada tahun 1973 sistem multi partai dibongkar dan disederhanakan hanya dengan dua partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan PPP yang ditahun fusi tersebut tak diperkenankan memakai nama Islam masih mendapat tekanan lagi diakhir Pemilu 1977 dimana PPP dipaksa untuk menanggalkan tanda gambar partai Islam dengan menyetujui tanda gambar bintang yang non-religius. Di samping dua partai tersebut ada satu Golongan, yaitu Golongan Karya yang anggotanya meliputi semua pejabat pemerintah, petani, buruh, kaum profesional dan Angkatan Bersenjata. Walaupun mengatakan diri bukan partai, Golkar sempurna menjadi satu-satunya partai pengusa yang selalu menang dalam setiap pemilu.

---

<sup>34</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik-Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, hlm. 19



Kehidupan politik menjadi monopoli penguasa, pergulatan ideologi menempatkan Pancasila versi penguasa sebagai pemenang yang mendominasi ruang publik. Orba dengan jargon melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen tak memperkenankan pemikiran yang berbeda muncul. Bahkan tafsir Pancasila sudah dibuat final dengan 32 butir yang harus terus diajarkan kepada para pejabat dan seluruh rakyat. Pada tahun 1984 semua partai politik “diminta” menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal. Sementara itu pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap partai politik dengan mengeluarkan Undang-undang no. 8 tahun 1985 dimana dibenarkan kontrol pemerintah terhadap organisasi di luar pemerintah, kalau perlu membubarkan, tanpa melalui prosedur hukum.<sup>35</sup> Politik menjadi barang haram di era Suharto. Mesin kekuasaan itu secara sempurna dipegang oleh ABRI sebagai kekuatan represif dan birokrasi sebagai institusi pengontrol.

Wajah politik negeri ini babak belur. Pancasila menjadi alat penguasa mengontrol rakyat. Bhineka tunggal ika, kini hanya meninggalkan Ika-semata, ika yang harus diikuti tanpa sikap kritis-rasional. Keseragaman ini melahirkan konflik dimana-mana karena rakyat menganggap aspirasinya tak diterima oleh negara. Negara begitu represif, proyek bersama sebagai bangsa terancam hancur karena orang hidup dalam kecurigaan. Diam-diam demi langgengnya kekuasaan politik *divide et impera* dipraktikkan dengan sempurna oleh Orba.

## **b. Pendidikan**

Perekayasa dunia pendidikan untuk kepentingan penguasa melahirkan dunia pendidikan mati, tak bernyawa. Pelajaran-pelajaran menjadi refrein yang melelahkan bagi peserta didik. Para pengajar dibuat tak berdaya karena semua tersentralisasi tanpa improvisasi. Dalam tulisan ini, akan ditelaah secara garis besar cara Orde Baru “mengatur” dunia pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Di dunia pendidikan kontrol ideologis menjadikan dunia pendidikan dalam penindasan tanpa kebebasan intelektual.

---

<sup>35</sup> Lih. Adnan Buyung, hlm. 433. Dimana Buyung mengutip dari Thoolen

Selain kurikulum yang terkontrol dunia pendidikan juga tidak lepas dari teror negara terutama perguruan tinggi. Hal ini karena aktivitas mahasiswa yang kritis terhadap kebohongan, korupsi, dan teror negara terhadap rakyat. Para mahasiswa secara pedas mengkritik rezim Suharto. Sebuah tindakan yang dijawab rezim dengan menyerbu ke kampus yang dilakukan oleh tentara untuk menangkap para mahasiswa.<sup>36</sup> Selain itu pemerintah menerapkan sistem yang ketat untuk perkuliahan, ‘normalisasi kehidupan kampus’ digalakkan oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf seorang doktor lulusan Perancis. Semua kebijakan ini untuk membungkam suara-suara yang kritis terhadap kekuasaan. Dalam bagian ini akan diuraikan pengawasan ketat dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

Pendidikan menjadi ajang propaganda doktrin-doktrin negara yang harus diikuti tanpa perlu bersikap kritis karena itu merupakan kurikulum “pesanan” negara. Mulai dari kewajiban mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sampai kepada kurikulum-kurikulum pendidikan yang menjadi sarana indoktrinasi. Selain itu, pendidikan juga menjadi ajang pembodohan karena sejarah yang ditulis seakan menempatkan militer sebagai satu-satunya pejuang demi persatuan dan pertahanan negeri ini. Sehingga pelajaran direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan militer. Asvi Warman Adam, sejarawan terkemuka negeri ini mengatakan bahwa dalam buku *IPS Sejarah untuk SMP kelas III* (C.S.T. Kansil, Erlangga, 1997) dapat terbaca bahwa militer mendominasi pendidikan sejarah negeri ini. Gambaran tentang PRRI tidak ada keterangan lain selain operasi penumpasan yang dilakukan militer. Misalnya digambarkan bahwa dalam waktu singkat PRRI dapat ditumpas pada tanggal 29 Mei 1958 dimana Ahmad Husein secara resmi melaporkan diri menyusul pasukan dan anggota PRRI lainnya. Asvi mempertanyakan, penulis buku pelajaran mengutip dari sumber yang mana? Karena Ahmad Husein baru menyerah tahun 1961, sedangkan tahun 1958, peristiwa itu baru dimulai. Jadi buku ini sudah

---

<sup>36</sup> Misalnya pada tanggal 9 Februari 1978, kelompok-kelompok perjuangan mahasiswa yang berpusat di Institut Teknologi Bandung dikepung dan diduduki satuan-satuan Divisi Siliwangi.

menyebarkan fakta sejarah yang keliru.<sup>37</sup> Demikian juga kisah kehebatan perwira pemimpin operasi begitu ditonjolkan hanya sekadar alat legitimasi untuk kepemimpinannya disuatu lembaga “basah” tertentu. Misalnya Letkol Ibnu Sutowo, perwira yang mengamankan wilayah Sumatera Selatan begitu ditonjolkan dalam buku pelajaran yang bagi Asvi hanyalah sekadar memberi legitimasi sejarah kepadanya untuk kelak memimpin Pertamina karena dia berjasa dalam operasi militer tersebut. Kisah ini semakin melegitimasi dominasi Angkatan Darat sejak tahun 1957 atas Pertamina sejak masih bernama Permina. Dimana Kasad Mayor Jendral Nasution menyuruh Deputy II Kolonel Ibnu Sutowo untuk mengambil-alih ladang minyak yang tidak dipergunakan di sebelah utara Sumatera. Perusahaan negara ini sungguh menjadi sapi perah. Sebagaimana dikatakan dalam buku: *Bila ABRI Menghendaki*<sup>38</sup>:

*Walaupun Pertamina merupakan BUMN, dalam praktiknya bekerja sebagai perusahaan swasta yang dijalankan oleh Ibnu Sutowo dan hanya bertanggungjawab kepada pimpinan ABRI. Memang secara formal Ibnu Sutowo harus bertanggungjawab kepada Menteri Pertambangan, tetapi ia mempunyai otonomi penuh. Otonomi Ibnu Sutowo ini hampir tak terbatas.*

Niels Mulder seorang peneliti terkemuka melakukan riset untuk buku-buku pelajaran yang digunakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas juga mengatakan bahwa dunia pendidikan menjadi ajang indoktrinasi sistimatis kekuasaan. Pendidikan dasar mengabaikan hal penting yakni sebagai ranah pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan menjadi beban yang terlalu berat bagi peserta didik dan menjadi ajang *brainwashing* sistimatis kekuasaan. Muelder memberi contoh pelajaran di kelas empat yang begitu ambisius untuk memberi sejarah Indonesia selengkap-lengkapnya bagi siswa kelas empat. Ini terlalu dipaksakan padahal

---

<sup>37</sup> Asvi Warman Adam, *Seabad Kontroversi Sejarah*, hlm. 117

<sup>38</sup> Dr. Indria Samego (et.al.), *Bila ABRI Menghendaki*, hlm. 121

pelajaran ini akan diulangi di SLTP dan SLTA. Demikian juga ambisi untuk menanamkan ideologi nasional menimbulkan kekacauan penalaran.<sup>39</sup>

Beberapa contoh kekacauan penalaran ini karena pelajaran-pelajaran ini dirasuki oleh beban ideologis yang begitu besar sehingga mengabaikan kreatifitas berpikir.<sup>40</sup> Tentang kebudayaan Daerah sebuah tema yang menarik. Namun muatan ideologis mebaut tawar semuanya, pelajaran ini menjadi ajang promosi keharmonisan yang diinginkan kekuasaan sebagaimana tergambar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Maka tema ini membosankan bahkan sangat membosankan karena diberikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Bagian tentang Desa dan Kota hanya menjadi ajang, indoktrinasi perihal pembangunan yang menjadi salah satu kerangka ideologi Orde Baru. Demikian juga tema tentang Pekerjaan dan Koperasi menjadi ajang promosi pengamalan Pancasila versi kekuasaan melalui Koperasi sebagaimana undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pelajaran-pelajaran hanyalah menjadi ajang legitimasi kekuasaan dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang monointerpretasi.<sup>41</sup>

Bagaimana lebih lanjut tentang Pancasila? Untuk pendidikan Pancasila Mulder dengan bepegang pada buku pelajaran yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekolah Dasar, kelas 1-6*, Jakarta: Balai Pustaka 1996. Untuk pelajaran Sekolah Menengah Atas dipakai buku: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, kelas 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996. Dua buku ini identik, sebagai pelajaran wajib dari SD sampai dengan SMA. Isinya merupakan pengulangan yang membosankan namun harus terus menerus dihafal peserta didik tanpa perlu membenturkan dengan kenyataan yang terjadi.

Niels Mulder merinci beberapa tema yang dibicarakan dalam buku pelajaran kelas satu yaitu: “Kerapian”, “Cinta Kasih”, “Kebanggaan”,

---

<sup>39</sup> Muelder, Images, hlm. 41

<sup>40</sup> Contoh-contoh dibawah ini. lihat Muelde, hlm. 42

<sup>41</sup> Meskipun Orde Baru mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka namun dalam praktik sebagaimana terlihat di atas tidaklah demikian karena Pancasila hanya sah dalam penjelasan Pemerintah. Bdk. Adnan Buyung hlm. 425

“Ketertiban”, “Saling Membantu”, “Kerukunan”, “Keberanian”, “Kebersihan” dan “Kesehatan”, “Sikap Hemat”, “Keadilan”, “Kepatuhan”, “Belas Kasih”, “Kesetiaan”, “Bakti” dan “Saling Menghormati”. Tema-tema ini akan diulang secara terus menerus sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Maka dikatakan Mulder bahwa pada tahun-tahun di antara tahun pertama dan tahun kedua belas, pendidikan nilai sedikit demi sedikit menjadi indoktrinasi politik, yang karena diulang-ulang, menjadi tumpangtindih, dan perasaan bosan dan jemu baru terlupakan setelah tes atau ujiannya lulus.<sup>42</sup>

Akhirnya pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi pelajaran dengan logika yang tumpang tindih karena dipaksakan. Misalnya:<sup>43</sup>

*Berkali-kali pelajaran kewarganegaraan dan Pancasila menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bukan pernyataannya, melainkan kesimpulan yang ditarik dari pernyataan itulah yang tidak bersesuaian. Dengan mengulang-ulang pernyataan tersebut, kesimpulan ‘Individu tunduk kepada kelompok’ harus meresap di hati. Namun, di sini kita temukan pernyataan netral yang sayang tidak diulang-ulang dalam pelajaran selanjutnya, yaitu pernyataan bahwa hubungan sosial merupakan kesimpulan dasar kehidupan bermasyarakat. Ini sosiologi yang sehat yang akan ditumpangi ideologi lapis demi lapis dalam pelajaran berikutnya. Hal ini dipermudah oleh bahasa sendiri: istilah masyarakat bersifat ambivalen. Artinya yang pertama mendekati ‘komunitas’, tetapi digunakan untuk ‘masyarakat luas’ juga.*

Pelajaran Pancasila dan pelajaran lain yang dipaksakan untuk mengakui kesaktian Pancasila, bahasa yang paling banyak dipakai Orba akhirnya membuat Pancasila menjadi pelajaran rutin, melelahkan dan membosankan tanpa ada kebaruan dan kekritisannya. Pancasila menjadi strategi jangka panjang perwujudan menjadi Indonesia tetapi dipakai dan dipaksakan menjadi strategi jangka pendek menghamba pada kekuasaan.

---

<sup>42</sup> Niels Mulder, *Individu Masyarakat dan Sejarah-Kajian Kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia*, hlm. 30-31

<sup>43</sup> Contoh ini lihat Muelder, hlm. 59.

### C. Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai ideologi perlu dibahas secara khusus karena bila mencermati pergumulan sejak tahun 1945, masa Sukarno dan Suharto, ideologi menjadi latar belakang penting. Dalam pengantar buku "*Tjamkan Pantja Sila*<sup>44</sup>", Pancasila sebagai Ideologi itu tergambar dengan jelas. Hal ini bisa dibaca dari kata-kata perestuan yang diberikan Sukarno untuk terbitan buku ini. Ia mengatakan: "Bangsa Indonesia sejak Proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita." Demikian juga Suharto dalam berbagai pidato mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Bahkan secara khusus BP7 mengadakan seminar dan dari seminar itu diterbitkan buku berjudul "*Pancasila Sebagai Ideologi*".<sup>45</sup> Maka tak diragukan lagi bahwa konsep ideologi begitu melekat pada Pancasila. Universitas Gadjah Mada sebagai universitas "Pancasila" juga mengatakan secara tegas bahwa Pancasila sebagai ideologi. Dalam pengantar buku "*Daulat-Rakyat vs Daulat-Pasar: The Real War-Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*<sup>46</sup>" Sri Edi Swasono mengatakan bahwa buku ini bermaksud menegakkan Ideologi Pancasila.

Dari beberapa terbitan ini dapat terlihat bahwa ada pertautan yang begitu erat antara Pancasila dengan ideologi. Mengapa ideologi menjadi perdebatan yang serius di zaman itu? Adnan Buyung Nasution dalam buku: *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959* juga memberi perhatian pada dimensi ideologi ini. "Dasar negara telah menjadi masalah semenjak adanya usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Definisinya sebagai ideologi sudah hampir pasti disebabkan semangat masa itu. Perang Dunia Kedua juga merupakan perang ideologi."<sup>47</sup> Oleh karena itu, sangat mendasar bila ideologi perlu ditelaah terus menerus karena ia menyangkut hidup orang banyak.

---

<sup>44</sup> Buku ini terbit tahun 1964

<sup>45</sup> Seminarsya dilaksanakn tanggal 24-26 Oktober 1989 sedangkan bukunya terbit 1991

<sup>46</sup> Buku ini terbit tahun 2005

<sup>47</sup> bdk., hlm. 57

## 1. Apa itu ideologi

Istilah ini paling banyak dipakai dalam ilmu-ilmu sosial dengan arti yang tidak begitu jelas. Karl Marx (1818-1883) merupakan pemikir yang meramaikan jagat perdebatan ideologi. Bagi Marx ideologi adalah kesadaran palsu: kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai moral tinggi dengan sekaligus menutup kenyataan bahwa di belakang nilai-nilai luhur itu tersembunyi kepentingan-kepentingan egois kelas-kelas berkuasa.<sup>48</sup> Kalau demikian apakah ideologi itu mempunyai pengertian positif atau negatif? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan mengerti tiga macam ideologi.<sup>49</sup> *Pertama ideologi dalam arti penuh* biasanya mengandung beberapa unsur seperti, kebenaran yang mutlak, klaim-nya juga tidak hanya bermuatan prinsip dasar tetapi sampai pada konkret operasional sehingga suara hati dan kebebasan berpikir tak diberi ruang. Selain itu ideologi dalam arti penuh merupakan ideologi elitis dalam pengertian tidak diambil dari nilai-nilai yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Namun dirumuskan dan dipaksakan kepada rakyat oleh sekelompok elit yang berkuasa. *Kedua ideologi terbuka*, bercirikan pengejawantahan kebebasan dalam berbagai dimensi kehidupan. Ia juga hanya bicara pada tataran orientasi dasar. *Ketiga, Ideologi implisit*, yaitu keyakinan yang tak dirumuskan dan diajarkan tetapi telah meresapi dan mempengaruhi seluruh corak hidup masyarakat.

Namun ketika dunia menjadi ruang yang datar meminjam Thomas Friedman dalam karyanya *The World is Flat* maka pembicaraan tentang ideologi tak banyak berarti. Proklamasi Fukuyama, Daniel Bell tentang akhir ideologi semakin memudahkan omongan bahkan pertarungan tentang ideologi. Barangkali pertarungan ideologi berakhir namun tidak berarti bahwa ideologi yang keluar sebagai pemenang tak perlu dikawal dengan pemikiran kritis-rasional. Kita tak mungkin terbuai begitu saja dalam euphoria pemikiran tentang kemenangan dan akhir perjuangan ideology.

---

<sup>48</sup> Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, hlm. 228

<sup>49</sup> Tiga macam ideologi ini lihat, Franz Magnis-Suseno, *ibid.*, hlm. 232-237

## 2. Pancasila sebagai Ideologi

Pancasila sebagai ideologi merupakan wacana yang perlu terus dikembangkan. Seringkali muncul pertanyaan, apakah Pancasila merupakan ideologi? Jawaban atas pertanyaan ini yaitu Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ini berarti bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai yang disepakati bukan sebagai teori dari luar yang dipropagandakan, melainkan sebagai rumusan nilai-nilai dan cita-cita yang memang hidup dalam masyarakat dalam konteks ketekadan bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara kesatuan.<sup>50</sup>

Rumusan nilai yang hidup di tengah masyarakat itu yang perlu digali karena hanya dengan itu Pancasila sungguh menjadi milik semua bangsa. Pancasila tidak lagi menjadi alat penindasan dan dikerdilkan oleh elit penguasa. Pendek kata dengan terus menggali Pancasila, ia sungguh menjadi ideologi terbuka, ideologi yang *tolerate* dan menghargai kemanusiaan.

Penelitian dengan ini bertujuan untuk menjadikan Pancasila sebuah realitas yang dinamis, hidup dan ada untuk kesejahteraan rakyat. Disana pemahaman Pancasila sebagai ideologi berarti dan bermakna.

---

<sup>50</sup> Ibid., Magnis hlm. 237



## BAB III

### DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN

#### A. Data Responden Penelitian

Data responden adalah informasi mengenai responden yang menjadi sampel penelitian ini. Responden penelitian ini adalah mahasiswa Unpar yang telah atau pernah mengikuti Mata Kuliah Pendidikan Pancasila semester genap tahun ajaran 2007/2008 yang tersebar dalam delapan kelas, yaitu kelas A, B, L, M, N, O, P, dan Q. Jumlah responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebanyak 381 orang atau sebanyak 41,5 % dari total peserta MK Pendidikan Pancasila sebanyak 918 orang. Data responden ini kemudian dibagi berdasarkan jumlah per angkatan, yaitu 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 dengan rincian sebagai berikut :

No	Angkatan	Jumlah Responden	Persentase
1.	2002	2	0,5 %
2	2003	8	2 %
2	2004	19	5 %
3	2005	30	8 %
4	2006	112	29,5 %
5	2007	210	55 %
	<b>Jumlah</b>	<b>381</b>	<b>100 %</b>

#### B. Pandangan Akhir Responden Tentang Materi dan Metode Pendidikan Pancasila

Pandangan akhir responden yang dimaksudkan di sini adalah pendapat, tanggapan, atau kesan responden setelah mereka mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila selama satu semester. Terdapat sembilan item pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini. Kesembilan pertanyaan yang kami sebarakan dalam bentuk angket kepada responden dapat kami bagi menjadi tiga bagian pokok, yaitu *pertama*, pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap materi

perkuliahan pendidikan Pancasila. Pertanyaan ini dapat diklasifikasi ke dalam tiga bagian, yaitu 1) Pendapat responden apakah Materi Pendidikan Pancasila itu menarik atau tidak menarik minat mahasiswa untuk kuliah. 2) Pendapat responden apakah materi Pendidikan Pancasila bermanfaat atau tidak bagi kehidupan mereka. 3) Pendapat responden apakah materi pendidikan Pancasila padat, dalam arti terlalu banyak, atau tidak. *Kedua*, pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap metodologi perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pertanyaan ini kami klasifikasikan ke dalam tiga pertanyaan pokok, yaitu 1) Pendapat responden apakah metode atau pendekatan yang digunakan dalam Pendidikan Pancasila itu menarik atau tidak menarik. 2) Pendapat responden apakah metode yang digunakan dalam Pendidikan Pancasila bermanfaat atau tidak dalam mempresentasikan materi perkuliahan. 3) Pendapat responden apakah metode yang digunakan membantu mereka dalam memahami materi atau tidak. *Ketiga*, pertanyaan mengenai pendapat responden terhadap dosen yang mengajar Pendidikan Pancasila. Pertanyaan kami klasifikasikan ke dalam tiga pertanyaan, yaitu 1) apakah dosen dalam mengajar sangat monoton atau tidak, 2) apakah dosen membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan atau tidak, dan 3) apakah dosen dalam mengajar interaktif dengan mahasiswa atau tidak.

Ketiga aspek di atas, yaitu materi, metode, dan dosen, yang masing-masing memiliki tiga pertanyaan pokok, merupakan fokus utama pembahasan dan analisis kami dalam penelitian ini. Di bawah ini kami akan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan ketiga aspek yang kami jelaskan di atas.

### **1. Pandangan atau Tanggapan Akhir Responden Terhadap Materi**

Data ini hendak memperlihatkan apa yang responden persepsikan atau kesankan berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila secara keseluruhan. Di bawah ini kami akan mendeskripsikan tiga aspek yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan materi, yaitu 1) menarik atau tidak menarik minat mahasiswa untuk kuliah. b) bermanfaat atau tidak bagi kehidupan mereka. c) padat, dalam arti terlalu banyak, atau tidak.

**a. Menarik atau tidak menarik minat untuk kuliah**

Bagian pertama akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Materi Pendidikan Pancasila itu menarik atau tidak menarik minat mahasiswa untuk kuliah Pendidikan Pancasila? Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- 1) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar sangat menarik minat untuk kuliah adalah sebanyak 38 responden atau sebesar 10 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat Menarik	Persentase
2002	0	0 %
2003	0	0 %
2004	1	3 %
2005	2	5 %
2006	14	37 %
2007	21	55 %
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila menarik minat untuk kuliah sebanyak 282 responden atau sebesar 74 % dari total 381 Responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Menarik	Persentase
2002	2	1 %
2003	8	3 %
2004	13	4 %
2005	22	8 %
2006	85	30 %
2007	152	54 %
<b>TOTAL</b>	<b>282</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila kurang menarik minat untuk kuliah sebanyak 58 responden atau sebesar 15 % dari total 381 reseeden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang menarik	Persentase
2002	0	0 %
2003	0	0 %
2004	5	9 %
2005	5	9 %
2006	13	22 %
2007	35	60 %
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila tidak menarik minat untuk kuliah sebanyak 3 responden atau sebesar 1 % dari total 381 Responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak menarik	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	1	33 %
2006	-	-
2007	2	67 %
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100 %</b>

**b. Bermanfaat atau tidak bagi kehidupan dalam masyarakat.**

Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Materi Pendidikan Pancasila itu Bermanfaat atau tidak bagi kehidupan mereka? Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- 1) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar sangat bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 61

responden atau sebesar 16 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat bermanfaat	Persentase
2002	-	-
2003	1	2 %
2004	2	3 %
2005	2	3 %
2006	21	35 %
2007	35	57 %
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 274 responden atau sebesar 72 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Bermanfaat	Persentase
2002	2	1 %
2003	7	2 %
2004	14	5 %
2005	25	9 %
2006	76	28 %
2007	150	55 %
<b>TOTAL</b>	<b>274</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar kurang bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 41 responden atau sebesar 11 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang bermanfaat	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	3	7 %
2005	3	7 %
2006	10	25 %
2007	25	61 %
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar tidak bermanfaat bagi kehidupan dalam masyarakat adalah sebanyak 5 responden atau sebesar 1 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang bermanfaat	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	5	100 %
2007	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100 %</b>

**c. Padat atau tidak, dalam arti materinya terlalu banyak?**

Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Materi Pendidikan Pancasila itu padat, dalam arti terlalu banyak, atau tidak? Hal ini berkaitan dengan kesanggupan mereka untuk mengendapkan dan memahami materi yang diberikan. Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- 1) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar sangat padat adalah sebanyak 54 responden atau sebesar 14,2 % dari total

381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat Padat	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	3	6 %
2005	1	2 %
2006	18	33 %
2007	32	59 %
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar padat adalah sebanyak 217 responden atau sebesar 57 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Padat	Persentase
2002	2	1 %
2003	6	3 %
2004	12	5 %
2005	25	11 %
2006	62	29 %
2007	110	51 %
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar kurang padat adalah sebanyak 88 responden atau sebesar 23 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang padat	Persentase
2002	-	-
2003	2	2 %
2004	4	5 %
2005	3	3 %

2006	20	23 %
2007	59	67 %
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa Materi Pendidikan Pancasila di Unpar tidak padat adalah sebanyak 22 responden atau sebesar 5,8 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Padat / Tidak banyak	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	1	5 %
2006	12	54 %
2007	9	41 %
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>100 %</b>

## **2. Pandangan Akhir Responden terhadap Metode Perkuliahan Pendidikan Pancasila.**

Data ini hendak memperlihatkan apa yang responden persepsikan atau kesankan berkaitan dengan metode perkuliahan Pendidikan Pancasila. Di bawah ini kami akan mendeskripsikan tiga aspek yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan metode, yaitu 1) metode yang digunakan menarik atau tidak menarik minat mahasiswa untuk kuliah. 2) bermanfaat atau tidak dalam menghadirkan materi 3) membantu atau tidak dalam memahami materi yang diberikan.

### **a. Metode yang digunakan menarik atau tidak minat mahasiswa untuk kuliah.**

Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Metode perkuliahan Pendidikan



Pancasila menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan atau tidak. Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- 1) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila sangat menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan adalah sebanyak *62 responden atau sebesar 16,3 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat Menarik	Persentase
2002	2	3 %
2003	1	2 %
2004	2	3 %
2005	2	3 %
2006	20	32 %
2007	35	57 %
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan adalah sebanyak *232 responden atau sebesar 60,9 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Menarik	Persentase
2002	-	-
2003	7	3 %
2004	13	6 %
2005	22	9 %
2006	76	33 %
2007	114	49 %
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila kurang menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan

adalah sebanyak 75 responden atau sebesar 19,7 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang Menarik	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	4	5 %
2005	6	8 %
2006	16	22 %
2007	49	65 %
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila tidak menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan adalah sebanyak 12 responden atau sebesar 3,1 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Menarik	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	12	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>100 %</b>

**b. Metode yang digunakan bermanfaat atau tidak dalam menghadirkan materi.**

Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Metode yang digunakan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila bermanfaat dalam menghadirkan materi

perkuliahan sehingga mahasiswa semakin memahami dan mengendapkan materi perkuliahan. Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- 1) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila sangat bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak 43 responden atau sebesar 11,3 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat Bermanfaat	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	2	5 %
2005	-	-
2006	20	46 %
2007	21	49 %
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak 292 responden atau sebesar 76,6 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Bermanfaat	Persentase
2002	2	1 %
2003	8	3 %
2004	11	4 %
2005	24	8 %
2006	83	28 %
2007	164	56 %
<b>TOTAL</b>	<b>292</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila kurang bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak

43 responden atau sebesar 11,3 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang bermanfaat	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	6	14 %
2005	6	14 %
2006	9	21 %
2007	22	51 %
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila tidak bermanfaat dalam menghadirkan materi adalah sebanyak 3 responden atau sebesar 0,8 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Bermanfaat	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	3	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100 %</b>

**c. Metode yang digunakan membantu mahasiswa memahami materi atau tidak.**

Bagian ini akan mendeskripsikan pendapat, tanggapan, dan kesan responden berkaitan dengan pertanyaan apakah Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang

diberikan atau tidak. Jawaban yang diperoleh dapat kami gambarkan sebagai berikut :

- 1) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan Pancasila adalah sebanyak 65 responden atau sebesar 17 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	4	6 %
2005	-	-
2006	29	45 %
2007	32	49 %
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan Pancasila adalah sebanyak 261 responden atau sebesar 68,5 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Membantu	Persentase
2002	2	1 %
2003	8	3 %
2004	11	4 %
2005	25	10 %
2006	74	28 %
2007	141	54 %
<b>TOTAL</b>	<b>261</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila kurang membantu mahasiswa dalam memahami materi

Pendidikan Pancasila adalah sebanyak *52 responden atau sebesar 13,6 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	4	8 %
2005	5	10 %
2006	8	15 %
2007	35	67 %
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa Metode perkuliahan Pendidikan Pancasila tidak membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan Pancasila adalah sebanyak *3 responden atau sebesar 0,8 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	1	33 %
2007	2	67 %
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>100 %</b>

### **3. Persepsi Akhir Responden Terhadap Dosen MPK Pendidikan Pancasila**

Data ini hendak memperlihatkan apa yang responden persepsikan atau kesankan berkaitan dengan dosen yang mengajar MPK Pendidikan Pancasila. Di bawah ini kami akan mendeskripsikan tiga aspek yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan pandangan responden terhadap dosen, yaitu 1) dosen yang

mengajar apakah monoton atau tidak, 2) apakah dosen membantu mahasiswa dalam memahami materi atau tidak 3) dalam mengajar apakah dosen interaktif atau tidak. Kami akan mendeskripsikan ketiga aspek ini berdasarkan data penelitian satu persatu di bawah ini.

**a. Dosen yang mengajar apakah monoton atau tidak.**

- 1) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila dengan sangat monoton adalah sebanyak 7 *responden atau sebesar 1,8 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Sangat Monoton	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	1	14 %
2006	1	14 %
2007	5	72 %
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila secara monoton adalah sebanyak 101 *responden atau sebesar 26,5 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Monoton	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	2	2 %
2005	13	13 %
2006	24	24 %
2007	62	61 %
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila secara kurang monoton adalah sebanyak 152 *responden atau sebesar 39,9 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Kurang Monoton	Persentase
2002	2	1 %
2003	2	1 %
2004	2	1 %
2005	4	4 %
2006	41	27 %
2007	101	66 %
<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila tidak secara monoton adalah sebanyak 121 *responden atau sebesar 31,8 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Monoton	Persentase
2002	-	-
2003	6	5 %
2004	15	12 %
2005	12	10 %
2006	46	38 %
2007	42	35 %
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>100 %</b>

**b. Dosen membantu mahasiswa memahami materi atau tidak.**

- 1) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 84



*responden atau sebesar 22 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	2	2 %
2003	1	1 %
2004	4	5 %
2005	5	6 %
2006	31	37 %
2007	41	49 %
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 264 *responden atau sebesar 69 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	7	3 %
2004	14	5 %
2005	24	9 %
2006	76	29 %
2007	143	54 %
<b>TOTAL</b>	<b>264</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila kurang membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 31 *responden atau sebesar 8 %* dari total 381 responden. Distribusi sebaran

jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	1	3
2005	1	3
2006	5	16
2007	24	78
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila tidak membantu mahasiswa dalam memahami materi adalah sebanyak 2 responden atau sebesar 0,5 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	2	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100 %</b>

### c. Dosen interaktif atau tidak dalam mengajar.

- 1) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat interaktif adalah sebanyak 103 responden atau sebesar 27 % dari total

381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	2	2 %
2003	2	2 %
2004	6	6 %
2005	9	9 %
2006	34	33 %
2007	50	48 %
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>100 %</b>

- 2) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat interaktif adalah sebanyak 246 responden atau sebesar 64,5 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	6	2 %
2004	12	5 %
2005	21	9 %
2006	67	27 %
2007	140	57 %
<b>TOTAL</b>	<b>246</b>	<b>100 %</b>

- 3) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat interaktif adalah sebanyak 30 responden atau sebesar 8 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	1	3 %
2005	-	-
2006	11	37 %
2007	18	60 %
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>100 %</b>

- 4) Responden yang menyatakan bahwa cara dosen dalam mengajar atau menyampaikan atau menjelaskan materi Pendidikan Pancasila sangat interaktif adalah sebanyak 2 responden atau sebesar 0,5 % dari total 381 responden. Distribusi sebaran jawaban responden berdasarkan angkatan dapat kami gambarkan dalam tabel berikut ini :

Angkatan	Tidak Membantu	Persentase
2002	-	-
2003	-	-
2004	-	-
2005	-	-
2006	-	-
2007	2	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100 %</b>

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Analisis kualitatif dan pembahasan hasil penelitian ini akan meliputi tiga aspek penting yang juga merupakan tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama, persepsi akhir responden terhadap materi Pendidikan Pancasila, kedua, persepsi akhir responden berkaitan dengan metode yang digunakan dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila, dan ketiga, persepsi responden berkaitan dengan dosen yang mengajar MK Pendidikan Pancasila. Di bawah ini kami mencoba membahas secara kualitatif berdasarkan data kuantitatif yang telah kami deskripsikan di atas. Analisis ini diharapkan dapat memetakan persoalan penelitian berdasarkan ketiga hal yang telah kami kemukakan di atas.

Berbicara tentang pendapat atau pandangan erat berkaitan dengan subyektifitas manusia. Artinya pendapat, tanggapan, atau kesan yang disampaikan mengandung refleksi personal manusia terhadap fenomena, realitas, atau peristiwa yang dialami atau dihadapi. Pendapat dari sudut ini tentu akan sangat subyektif sifatnya. Meski demikian, pendapat maupun pandangan individu sangat penting dalam rangka membangun kesadaran akan realitas yang sesungguhnya. Secara teoretis, pendapat seringkali dipandang sebagai kegiatan yang berada mendahului kesadaran dan pengamatan. Tetapi pendapat yang dimaksudkan di sini adalah ungkapan atau tanggapan subyek terhadap sebuah fenomena atau peristiwa yang dialaminya. Dalam penelitian ini fenomena ataupun peristiwa yang dialami responden adalah Pendidikan Pancasila. Di bawah ini kami mencoba menganalisis secara kualitatif pendapat atau pandangan responden mengenai ketiga aspek penelitian di atas. Analisis ini berdasarkan data dan fakta yang diperoleh melalui angket dan FGD (Fokus Group Discussion).

## **A. Pandangan Atau Tanggapan Responden terhadap Materi Pendidikan Pancasila.**

Bagian ini akan membahas tiga aspek penting menyangkut materi, yaitu tentang materi yang menarik, bermanfaat, dan kepadatan materi Pendidikan Pancasila.

### **1. Materi Pendidikan Pancasila Menarik atau Tidak.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- (1) Materi Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat menarik minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Pendidikan Pancasila sebanyak 10 %
- (2) Menarik sebanyak 74 %,
- (3) Kurang menarik sebanyak 15 %, dan
- (4) Tidak menarik sebanyak 1 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Berdasarkan data di atas secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa responden yang pernah mengikuti MK Pendidikan Pancasila mayoritas menjawab bahwa materi MK Pendidikan Pancasila menarik, yaitu sebesar 74 %. Bila diakumulasikan, responden yang menjawab secara positif, yaitu yang memilih jawaban sangat menarik dan menarik, merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah sebesar 84 %. Sedangkan yang menjawab tidak menarik, yaitu yang berpendapat bahwa materi Pendidikan Pancasila kurang maupun tidak menarik, sebanyak 16 %.

Dilihat dari data tersebut mereka yang berpendapat secara positif terhadap materi Pendidikan Pancasila sangat signifikan dibandingkan dengan mereka yang berpendapat sebaliknya. Data ini sekaligus menunjukkan fakta telah terjadinya pergeseran dan perubahan kesan atau tanggapan berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila. Hasil penelitian terhadap persepsi awal mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila menunjukkan hasil mayoritas responden mempersepsikan

bahwa materi Pendidikan Pancasila tidak menarik<sup>51</sup>. Dalam penelitian yang hendak menangkap kesan atau tanggapan akhir mahasiswa ini, responden berpandangan sangat positif terhadap materi Pendidikan Pancasila dan menunjukkan fakta yang sebaliknya, yaitu bahwa materi Pendidikan Pancasila itu menarik.

Dari hasil penelusuran terhadap aspek ini diperoleh fakta bahwa mereka yang memberikan tanggapan secara positif melihat ada perbedaan secara mendasar antara materi Pendidikan Pancasila *ala* PPKN di SD – SMU dengan materi Pendidikan Pancasila di Unpar. Menurut responden perbedaan terutama terletak pada kajian filosofis terhadap Pancasila yang dihadirkan dalam materi perkuliahan Pendidikan Pancasila di Unpar. Bagi mereka pemahaman filsosofis merupakan sebuah pengalaman yang baru dan unik dalam dunia pendidikan mereka. Penggunaan pendekatan filosofis dalam mengemas materi Pendidikan Pancasila merupakan sebuah terobosan yang menarik dan menantang. Kemenarikan dan kemenantangan justru terletak pada dinamika pembelajaran dan proses pemahaman yang menuntut daya kritis tinggi dalam memahami setiap pokok materi yang dibahas dan diajarkan.

Responden yang menanggapi secara positif materi Pendidikan Pancasila ini menyebutkan bahwa pendekatan filsafat sangat diperlukan untuk mengkaji dan menguji validitas dan obyektivitas nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah Dasar Negara dan Ideologi. Persepsi negatif terhadap materi Pendidikan Pancasila yang mencuat di awal perkuliahan, misalnya sangat konseptual, teoretis, indoktrinatif, membosankan, dsb., dsb, berubah menjadai pandangan yang jauh lebih positif. Di sini dapat disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman terhadap materi Pendidikan Pancasila dari yang teoretis-indoktrinatif menjadai filosofis-kontekstual dan eksperiensial-faktual. Responden menyadari sungguh bahwa pemahaman baru terhadap Pancasila harus dimulai dengan membongkar berbagai kedok ideologis dan indokrinatif dari Pancasila itu sendiri. Menurut mereka apa yang disajikan melalui materi Pendidikan Pancasila di Unpar cukup menarik

---

<sup>51</sup> Bdk. Andreas Doweng Bolo dkk., Persepsi Awal Mahasiswa Terhadap Pendidikan Pancasila di Unpar, Penelitian Pendidikan Pancasila, PKH, 2009.

untuk diikuti dan menunjukkan bahwa ada pemahaman dan kesadaran lain dalam melihat dan memahami Pancasila. Responden ini juga menilai bahwa penggunaan contoh-contoh dan fakta-fakta yang aktual dan real yang langsung bersentuhan dengan realitas semakin mempertajam pemahaman mereka terhadap materi perkuliahan.

Pemahaman responden sebagaimana yang dibahas di atas sangat relevan dengan fakta tentang materi Pendidikan Pancasila. Dapat kami sebutkan di sini bahwa materi Pendidikan Pancasila di UNPAR, yang kini dikemas dalam bentuk buku ajar (terbitan tahun 2007)<sup>52</sup>, memuat kajian kritis-filosofis untuk memperdalam pengetahuan tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ditelaah satu per satu secara kritis-reflektif, holistik, mendalam, dan normatif. Ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam terhadap Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup negara-bangsa Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk melatih daya kritis mahasiswa terhadap segala bentuk ideologisasi dan indoktrinasi<sup>53</sup>. Nampaknya pandangan dan tanggapan responden tersebut sejalan dengan tujuan dan harapan diselenggarakannya perkuliahan Pendidikan Pancasila, dimana salah satunya adalah melatih kemampuan kritis mahasiswa untuk mendalami dan memahami Pancasila sebagai landasan bernegara-bangsa Indonesia.

## **2. Materi Pendidikan Pancasila Bermanfaat Atau Tidak.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 1) Materi Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka dalam masyarakat sebanyak 16 %
- 2) Bermanfaat sebanyak 72 %,
- 3) Kurang bermanfaat sebanyak 11 %, dan

---

<sup>52</sup> Bdk. Slamet Purwadi, dkk., *Pendidikan Nilai Pancasila*, Unpar Press, Unpar, Bandung, 2006.

<sup>53</sup> Bdk. Andreas Doweng Bolo, *Persepsi Awal Mahasiswa terhadap Pendidikan Pancasila*, Unpar, Hasil penelitian tahun 2009, hlm. 43-47.



4) Tidak bermanfaat sebanyak 1 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Data di atas memperlihatkan bahwa mayoritas responden beranggapan dan berpendapat bahwa materi Pendidikan Pancasila di Unpar bermanfaat bagi kehidupan mereka dalam masyarakat. Jumlah responden yang setuju dan secara positif menegaskan bahwa materi Pendidikan Pancasila bermanfaat, yaitu sebesar 72 %. Akumulasi responden yang menjawab secara positif, yaitu yang memilih jawaban sangat bermanfaat dan bermanfaat sebesar 88 %. Hal ini mengindikasikan dan mengartikan bahwa apa yang dipelajari dan dialami oleh mahasiswa melalui pendidikan Pancasila memiliki efek sosial yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan Garis-Garis Besar Pembelajaran (GBP) Pendidikan Pancasila di Unpar yang menegaskan bahwa Pendidikan Pancasila berupaya menelaah / mengkaji berbagai fenomena hidup bangsa dan Negara Indonesia sebagai sebuah ruang publik dengan menggunakan pendekatan hermeneutika (filsafat) dan pendidikan nilai (pedagogik). Dengan bantuan hermeneutika mahasiswa diajak berpikir kritis terhadap segala bentuk ideologisme Pancasila dan melalui pendidikan nilai mahasiswa dilatih untuk memiliki nilai Pancasila. Nilai pengembangan diri intra-personal dan relasi inter-personal dapat tertanam melalui pendidikan Pancasila yang tujuannya adalah membangun kepribadian (*character building*) manusia Indonesia yang utuh, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila mengajak mahasiswa menilai realitas ruang publik sehari-hari secara mandiri dengan panduan nilai-nilai etis Pancasila tersebut.<sup>54</sup>

Keunggulan atau kekuatan materi Pendidikan Pancasila justru terletak pada penyampaian contoh-contoh real sebagai pengkayaan dan perbandingan materi. Ada beberapa manfaat yang menjadai catatan penting di sini. *Pertama*, materinya dapat membangun nasionalisme. *Kedua*, Dapat membentuk karakter sebagai warga negara yang baik. *Ketiga*, materinya bermuatan filosofis jadi menantang untuk ditelaah. Membantu mereka untuk memiliki kemampuan kritis terhadap situasi dan realitas sosial dalam masyarakat. *Keempat*, contoh-contoh

---

<sup>54</sup> Bdk. Satuan Acara Perkuliahan Pendidikan Pancasila, Pusat Kajian Humanora Unpar, 2006.

yang diberikan relevan dgn kehidupan. Dan kelima, membantu mahasiswa untuk mempelajari nilai kemasyarakatan. Dilihat dari hal yang disebutkan di atas dapat kita simpulkan terjadi pergeseran paradigma pemahaman mahasiswa terhadap penting dan perlunya pendidikan Pancasila. Pertama, Mahasiswa semakin mampu memahami pentingnya menumbuhkan kesadaran akan pluralitas atau keberagaman sebagai satau kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, melalui materi yang dipelajari mahasiswa semakin memahi perlunya menumbuhkan rasa persaudaraan dan membangun kehidupan bersama berdasarkan asas kebangsaan yang holistik.

Dilihat dari fakta di atas mengindikasikan bahwa semakin bertumbuhnya kesadaran dalam diri mahasiswa akan pentingnya Pendidikan Pancasila bagi mereka. Pendidikan Pancasila yang mengandung pendidikan nilai bertujuan membangun karakter kebangsaan. Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila secara rasional, sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila.

Kita sadari bahwa Pendidikan Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia, yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sasaran terakhir dari Pendidikan Pancasila adalah dipahami, dihayati dan diamalkannya nilai-nilai Pancasila tersebut oleh setiap mahasiswa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **3. Materi Pendidikan Pancasila padat (banyak/luas) atau Tidak.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 1) Materi Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat padat bagi kehidupan mereka dalam masyarakat sebanyak 14 %
- 2) Padat sebanyak 57 %,

- 3) Kurang padat sebanyak 23 %, dan
- 4) Tidak padat sebanyak 6 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Dilihat dari data di atas mayoritas responden berpendapat bahwa materi Pendidikan Pancasila yang diberikan di Unpar padat, yaitu sebesar 57 %. Bila pilihan pertama dan kedua diakumulasikan maka akan nampak mayoritas responden menjawab bahwa materi Pendidikan Pancasila cukup padat, yaitu sebesar 71 %. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden beranggapan bahwa materi Pendidikan Pancasila terlalu banyak atau sekurang-kurangnya cakupannya luas dan sulit dicerna.

Dalam anggapan atau pendapat mahasiswa materi yang padat merupakan sesuatu yang negatif dan tidak menguntungkan bagi mereka. Penelusuran terhadap persoalan ini mengungkap beberapa alasan atau faktor yang dapat kami catat berkaitan dengan anggapan atau pandangan mereka tentang materi Pendidikan Pancasila yang padat tersebut, yaitu :

1. Pendidikan Pancasila memuat banyak teori dari berbagai tokoh, baik tokoh tokoh filsafat, founding fathers Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional terkini.
2. Sangat banyaknya istilah-istilah filsafat yang dipakai sehingga membuat mahasiswa sulit untuk dapat memahaminya dengan baik.
3. Pendidikan Pancasila sangat didominasi oleh materi yang sifatnya hafalan.

Ketiga alasan di atas menunjukkan bahwa tingkat kepadatan materi Pendidikan Pancasila sebetulnya tidak terletak pada banyaknya materi yang terkandung dalam buku ajar, dalam hal ini buku Pendidikan Nilai Pancasila, dan bahan yang diberikan atau diajarkan, melainkan lebih didorong oleh keengganan mereka untuk menghafal. Bagi mahasiswa, materi yang disebut bagus itu bila tidak terlalu banyak menuntut untuk menghafal, tidak banyak menggunakan istilah-istilah asing, dan bahasanya sederhana. Hal ini sangat erat berhubungan dengan persiapan mereka dalam menghadapi ujian. Karena materi yang sederhana, dalam arti tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak menuntut

hafalan, akan mempermudah mereka untuk mempelajarinya dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian, baik tengah semester maupun akhir semester.

## **B. Metode kuliah Pendidikan Pancasila.**

Metode merupakan salah satu unsur penting dalam perkuliahan. Pembelajaran Pancasila ditingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas merupakan pengulangan terus-menerus sehingga memberi kesan jenuh dan bosan dalam diri peserta didik dengan pembelajaran ini. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan *Niels Muelder* bahwa pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar hanya diulang-ulang; garis besar resmi hampir secara harafiah identik. Memang ada detail yang berbeda, tetapi pelajaran hampir seluruhnya tumpang tindih (Niels Muelder: 2003: 73). Ini berarti metode ilmiah akademis tak begitu dihiraukan sehingga pembelajaran menjadi indoktrinasi. Karlina Leksono Supeli membahasakan dengan sangat gambalang situasi ini dengan mengatakan bahwa pendidikan yang seharusnya mempunyai posisi strategis di sebuah negara menjadi sarana untuk pencapaian tujuan politis. Pendidikan bukannya menghasilkan manusia yang kritis, kreatif dan mandiri dalam pemikiran, pendidikan menjadi sarana yang amat efektif untuk menyeragamkan pemikiran. Pendidikan secara sistimatis dapat menjadi pereproduksi ideologi kelompok yang dominan.<sup>55</sup> Orde baru yang ingin mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen ternyata menjadikan Pancasila sebagai tameng untuk melindungi kekuasaannya. Hal ini juga sebagaimana ditandaskan Ahmad Syafii Maarif, Golongan elite yang bekerja dengan mesin demokrasi Pancasila masih sulit berlapang dada dan sering menunjukkan kecurigaan yang tidak perlu terhadap perbedaan pendapat tentang isu-isu politik krusial.<sup>56</sup> Ditataran ini Pancasila dengan rumusan yang menyenangkan di tataran teoritis tanpa bisa dipraktikan dalam kehidupan berbangsa. Pancasila masih sekadar menjadi *das sollen* tetapi

---

<sup>55</sup> Pendapat Dr. Karlina Leksono-Supelli dalam kata pengantar buku, J.Drost, S.J. (ed.), *Arah pembangunan-Desentralisasi Pengajaran-Politik dan Konsensus*, hlm.xxi

<sup>56</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara-Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, hlm. 201

belum merupakan *das sein*.<sup>57</sup> Selain alasan-alasan di atas metode pembelajaran juga menjadi alasan peserta didik kurang menaruh perhatian pada pembelajaran ini karena metode pembelajaran yang monoton dan monologis.<sup>58</sup> Para guru dibuat tidak berdaya untuk mengembangkan sebuah pembelajaran yang kreatif karena harus mengikuti kurikulum nasional yang menjadi alat propaganda rezim yang berkuasa.<sup>59</sup> Hal ini tampak juga dalam penelitian pertama peneliti tentang persepsi awal mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila di Unpar. Peserta didik bosan dengan Metode dan sistem pembelajaran yang indoktrinatif tersebut.<sup>60</sup>

Belajar dari situasi ini maka dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila di UNPAR lebih dikembangkan penggalian yang berdimensi interaktif dan memperkaya peserta didik. Pancasila tidak lagi menjadi sebuah ideologi yang statis dan tertutup tetapi menjadi ideologi yang dinamis dan terbuka. Sehingga dipilih dua metode yaitu Metode Hermeneutika dan Pendidikan Nilai. Metode yang pertama mencoba menafsirkan berbagai dimensi kehidupan di negeri ini, baik itu dimensi historis, sosial, budaya, politik, dan hukum sedangkan metode pendidikan nilai mencoba merumuskan ulang dalam konteks kekinian Pancasila.<sup>61</sup>

Di bawah ini kami mencoba menganalisis dan membahas secara kualitatif ketiga aspek yang menjadi fokus penelitian mengenai metode kuliah yang digunakan.

### **1. Metode Kuliah Pendidikan Pancasila Manarik atau tidak**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 1) Metode kuliah Pendidikan Pancasila di UNPAR *sangat menarik* minat untuk kuliah sebanyak 16,3 %
- 2) *Menarik* sebanyak 60,9 %,

---

<sup>57</sup> Bdk. R. William Liddle, *Islam Politik dan Modernisasi*, hlm. XV

<sup>58</sup> Bdk. Andreas Doweng Bolo dan Sylvester Kanisius Laku, *Persepsi Awal Peserta Mata Kuliah PP terhadap PP di UNPAR*, 48-54

<sup>59</sup> Bdk. Pendapat Dr. Karlina Leksono-Supelli dalam J. Drost, hlm. xxi

<sup>60</sup> Andreas Doweng Bolo & Sylvester Kanisius Laku, *Persepsi Awal Peserta MK-PP terhadap Pendidikan Pancasila di Unpar*. Penelitian ini dibuat pada tahun 2008.

<sup>61</sup> Andreas Doweng Bolo, dkk, *Pendidikan Pancasila*, hlm. 5-9

- 3) *Kurang menarik* sebanyak 19,7 %, dan
- 4) *Tidak menarik* sebanyak 3,1 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Pertanyaan penting, apakah metode ini membawa hasil yang memuaskan? Memuaskan dalam pengertian mengubah pola yang indoktrinatif kepada situasi yang lebih terbuka dan kritis. Pengetahuan ini penting guna memelihara dan mengembangkan atau mengubah dan mengganti metode perkuliahan. Tujuan akhirnya tentu demi peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Bila dilihat dari data respons mahasiswa terlihat bahwa metode ini memuaskan peserta didik. Hal ini terlihat dari sebaran data persepsi peserta didik setelah mengikuti perkuliahan ini. Responden yang mengatakan bahwa metode yang digunakan menarik (60,9%) dan sangat menarik (16,3%). Data ini memperlihatkan ada pergeseran dimana sebelumnya peserta didik mempersepsikan buruk (33%) dan tidak tahu (47%) bergeser pada persepsi yang lebih baik.<sup>62</sup> Ini menunjukkan bahwa metode hermeneutika dan pendidikan nilai yang dipakai dalam pembelajaran ini menarik minat peserta didik. Persepsi di akhir perkuliahan ini mengindikasikan bahwa pilihan dan penerapan metode ini membantu mahasiswa untuk memahami materi perkuliahan. Hanya 3,1% yang secara bulat mengatakan bahwa metode ini tidak menarik dan 19,7% yang mengatakan bahwa metode ini kurang menarik. Bila kurang menarik ditafsirkan sebagai sebuah penilaian yang netral dalam artian masih ada unsur menarik dari metode ini maka tampak jelas bahwa metode ini merupakan sebuah pilihan yang tepat. Metode Pendidikan Pancasila yang dipakai di UNPAR tidak pertama-tama mengedepankan hasil melainkan proses pencarian bersama. Awal pencarian itu dengan mencoba membaca, mengklasifikasi dinamika sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi. Selain itu, dalam proses ini pun batasan-batasan baku tentang sejarah, ideologi coba diangkat dan dikritisi secara terbuka. Pendek kata pendekatan ini pertama bertujuan untuk melakukan sebuah destruksi paradigma berpikir yang nanti akan coba ditata ulang dengan semangat kebaruan yang lebih kontekstual. Maka juga dalam evaluasi tertulis, beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa pembelajaran ini sangat menarik dan

---

<sup>62</sup> Bdk. Andreas Doweng Bolo dkk, *Persepsi Peserta MK-PP terhadap Pancasila di Unpar*, hlm. 51

perlu dipertahankan. Kata-kata yang muncul seperti, sangat menarik, mantap, metodenya bagus, metode yang dipakai perlu dipertahankan merupakan ungkapan yang menyatakan secara demonstratif bahwa metode yang dipakai menarik dan sungguh menarik.

Ketertarikan merupakan unsur hakiki pembelajaran apalagi pembelajaran Pancasila ini berkaitan dengan nilai. Acapkali nilai dipandang sebagai bagian yang sekunder dalam proses pembelajaran.<sup>63</sup> Padahal nilai menjadi unsur hakiki pendidikan yaitu bahwa orang mempunyai watak dan karakter. Bila seseorang tidak mempunyai karakter tidak dapat menjadi pribadi yang dewasa.<sup>64</sup> Namun kenyataannya pendidikan termasuk pendidikan universitas membuat orang jatuh pada pragmatisme. Nilai dipandang hanya sekadar sesuatu yang pragmatis sesuatu yang sudah selesai dan tak lebih dalam direfleksikan. Padahal refleksi merupakan nadir pendidikan yang berbasis pada interaksi pengalaman. Interaksi dengan pengalaman tidak dengan cara menghafal tetapi dengan refleksi.<sup>65</sup> Nilai baru ramai dibicarakan manakala manusia menemukan kebuntuan dalam ranah teknis-materiil. Di titik ini dapat dilihat nilai hanyalah sekadar reaksi kebuntuan hidup dan bukan sebuah proyek hidup yang terus-menerus direfleksikan. Sehingga ketertarikan pada metode yang dipakai menjadi modal penting.

## **2. Metode Kuliah Pendidikan Pancasila Bermanfaat atau Tidak.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 1) Metode kuliah Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat bermanfaat sebanyak 11,3 %
- 2) Bermanfaat sebanyak 76,6 %,
- 3) Kurang bermanfaat sebanyak 11,3 %, dan
- 4) Tidak bermanfaat sebanyak 0,8 %.

---

<sup>63</sup> Hal ini dapat dilihat juga dari pengelolaan Mata Kuliah Umum/Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Dalam berbagai pertemuan dan forum dosen MKU/MPK (baik di Semarang atau di Solo) senantiasa muncul kesan peminggiran ini. MKU/MPK hanyalah menjadi mata kuliah tambahan yang senantiasa ditempatkan di waktu sisa.

<sup>64</sup> J.Drost, SJ, Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan, 5-6

<sup>65</sup> Ibid. hlm. 10

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Konsep menarik masih sangat dipermukaan untuk menguji validitas sebuah metode. Maka dalam pengujian kedua peneliti masuk pada dampak lebih real yaitu pada manfaat metode ini. Manfaat berarti tidak hanya sekadar persepsi inderawi belaka tetapi sudah menjadi bagian penting dari tindakan itu sendiri. Dari pengujian ini pun terlihat dengan jelas bahwa peserta mata kuliah memandang berarti metode ini dalam artian metode ini bermanfaat. Hal ini bisa dilihat dari sebaran responden terbanyak mengatakan bahwa metode ini sangat bermanfaat dan bermanfaat (11,3% dan 76,6%). Sebagai metode indikasi ini amat penting karena menunjukkan bahwa metode ini kontekstual dan menjawab kebutuhan mahasiswa. Sedangkan responden yang mengatakan bahwa metode ini tidak bermanfaat hanya 0,8% dan kurang bermanfaat 11,3 %. Data ini sekaligus mengindikasikan pandangan negatif tentang metode sangat minim.

Manfaat bila dipersepsi lebih dalam bisa dikategorikan dalam 2 dimensi yakni manfaat dekat (langsung) dan manfaat jauh (tidak langsung). Pertama, manfaat terdekat bagi mahasiswa sejauh ia bisa meraih dan mengetahui informasi sebanyak-banyaknya. Hal ini terungkap juga dalam berbagai catatan kuisioner agar para dosen juga memperhatikan print out bahan kuliah atau latihan soal harus diperbanyak. Manfaat itu bisa ditafsirkan sebagai kemampuannya untuk mengerti dan bisa menjawab soal ujian kelak. Dengan kata lain, manfaat berarti bahwa metode ini membantu peserta didik meraih nilai memuaskan. Bila dipahami dalam konteks ini rupanya mahasiswa mempersepsikan bahwa metode ini membantu peserta didik mencapai tujuan dekat itu. Kedua, manfaat jauh pun bisa diperoleh dari metode ini. Manfaat itu dalam pengertian bahwa metode itu membantu mahasiswa untuk mengerti realitas secara lebih terbuka. Usulan agar contoh dan diskusi diperbanyak atau penelitian lapangan merupakan sebuah usul yang tidak lagi terfokus sekedar 90 menit dalam ruang kelas tetapi juga dalam hidup di luar dinding universitas. Ini berarti bahwa metode ini tidak sekadar membantu mahasiswa memahami materi tetapi juga membantu mahasiswa memahami kompleksitas kehidupan bangsa ini.



Kedua manfaat perlu terus dikelola dan dikembangkan agar menjadi sebuah sinergi yang kreatif dan menghidupkan. Penekanan pada manfaat jangka pendek semata bisa membawa pembelajaran ini kearah pragmatisme semata. Demi nilai dan kelulusan dan tak ada sesuatu yang lain kecuali alasan ini. Namun, penekanan pada manfaat jauh pun bisa mengaburkan perkuliahan itu sendiri. Seolah-olah ini sebuah pembelajaran yang amat futuristik dan biasanya bagi mahasiswa hal itu kelewat melelahkan dan di awang-awang. Sehingga keharmonisan menjaga kedua manfaat ini sangat dibutuhkan bahwa sebuah metode bermanfaat untuk masa yang dekat tetapi juga tetap berarti sepanjang hidup.<sup>66</sup>

Manfaat sebuah metode tentu juga tak lepas dari tujuan Tujuan kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas terlihat gambaran dasar fungsi/manfaat pendidikan. Pada pasal 3 UU sisdiknas dikatakan: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.” Namun dalam kenyataan himpitan pragmatisme menjadikan orientasi pendidikan menjauh dari spirit Pembukaan dan UU sisdiknas. Hal ini juga disinyalir oleh Teuku Jacob yang mengatakan bahwa di Indonesia tidak hanya something is rotten melainkan everything is rotten in our state. Baginya sebab pembusukan ini karena kekeliruan fundamental dunia pendidikan kita yang mengarahkan diri pada pendidikan “siapa pakai” (siapa yang pakai?), untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai alat produksi untuk dapat dipasarkan di pasar bebas, bukan untuk menjadi manusia yang lebih beradab, menjadi warga negara yang cerdas dan pendukung budaya bangsa.

---

<sup>66</sup> Temuan-temuan para ilmuwan pun tidak hanya sekedar berfungsi di zamannya tetapi terus dipakai dan dikembangkan sepanjang masa.

Padahal pendidikan seharusnya membekali generasi muda dengan kiat-kiat sebagai manusia merdeka (*artes liberals*).<sup>67</sup> Manfaat dunia pendidikan demi pembebasan manusia pun semakin jauh dari harapan karena ternyata dunia pendidikan hanya menghasilkan manusia-manusia yang licik. Yang berhasil dalam dunia pendidikan bukan menghasilkan manusia cerdas tetapi licik. Pendidikan menjadi fase yang mengijinkan seseorang untuk berbuat apa saja asalkan mendapat untung.<sup>68</sup>

Segaris dengan semua pandangan dan cita-cita di atas sebuah metode yang baik harus menjadi lorong dan titian yang membawa kebebasan bagi peserta didik. Sehingga kembali ditandaskan bahwa persepsi yang baik terhadap manfaat metode ini tidak menjebak manusia dalam ranah bendawi semata tetapi juga ke arah spiritual. Dalam artian pendidikan membawa harapan yang membebaskan bagi manusia. Demikian juga pendidikan Pancasila tidak sekadar menjadi ideologi yang berdiam dalam menara gading tetapi sungguh menjadi praksis yang menghidupkan. Karena sebagaimana juga disinyalir bahwa orang muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sesungguhnya tidak apatis atau sinis dengan Pancasila di tataran ideologi tetapi lebih pada tataran praksis.<sup>69</sup> Hal yang sama juga ditegaskan Ketua Mahkamah Kontitusi Prof.Dr. Moh.Mahafud MD pada kongres Pancasila di Yogyakarta, 30 Mei 2009 yaitu bahwa sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia.<sup>70</sup>

### **3. Metode Kuliah Pendidikan Pancasila Membantu Memahami Materi atau Tidak.**

- 1) Metode kuliah Pendidikan Pancasila di UNPAR sangat Membantu mahasiswa dalam memahami materi sebanyak 17 %

---

<sup>67</sup> Prof.Dr.T Jacob, Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis-Catatan di Sejangkala, hlm. 243

<sup>68</sup> Eko Prasetyo, Orang Miskin Dilarang Sekolah, hlm. 193

<sup>69</sup> Lih. rumusan hasil sarasehan dan Simposium Pansila di UGM 15 Agustus 2006, dalam Proceeding Simposium dan Sarasehan- Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, hlm. 169-171

<sup>70</sup> Prof.Dr. Moh. Mahfud MD juga mengutip jajak pendapat Kompas, 30/9-2008 dimana 96,6% responden mengatakan bahwa Pancasila harus dipertahankan dan 92,1% menyatakan bahwa Pancasila sebagai landasan terbaik bangsa. Dan 55 % meragukan keseriusan pemerintah menerapkan pancasila dalam kehidupan bangsa

- 2) Bermanfaat sebanyak 68,5 %,
- 3) Kurang bermanfaat sebanyak 13,7 %, dan
- 4) Tidak bermanfaat sebanyak 0,8 %.

Di atas telah dikemukakan bahwa salah satu manfaat metode pendidikan yaitu membuat peserta didik memahami materi perkuliahan. Pemahaman terhadap materi perkuliahan bisa ditafsirkan sebagai sebuah pemahaman jarak dekat (langsung) dan jarak jauh (jangka panjang). Pemahaman jangka pendek didefinisikan sebagai mengingat materi yang diajarkan atau sebagaimana terdapat dalam buku pegangan. Batasan ini bisa digolongkan sebagai sebuah pemahaman normatif dan jangka pendek. Jangka pendek dalam artian bahwa selama lebih kurang 10-15 kali pertemuan/tatap muka di ruang kelas dan studi pribadi atas pelajaran ini ternyata metode membantu untuk menangkap materi. Jangka pendek itu juga berarti metode ini membantu mahasiswa selama satu semester untuk mengerti materi pembelajaran. Hal ini juga sebagai mana muncul dari lembaran komentar mahasiswa yaitu bahwa metode ini sangat menarik dan menarik serta membantu memahami materi. Ada juga catatan dari mahasiswa bahwa contoh-contoh praktis perlu dikembangkan dan agar tidak berbelit-belit. Catatan ini juga merupakan peringatan agar pendidikan Pancasila tidak terjebak pada retorika satu semester itu semata. Maka dari berbagai catatan dan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa untuk jangka pendek metode yang diterapkan dalam perkuliahan ini membantu peserta didik untuk menangkap materi. Namun keberhasilan ini juga ditopang oleh pandangan yang jauh ke depan dari peserta didik sebagaimana catatan kritis dari kuisioner. Bahwa perlu ada contoh yang praktis, dosen harus mem-Pancasila-kan mahasiswa dapat terbaca bahwa tidak hanya jangka pendek semata peserta menyikapi pembelajaran tetapi juga jangka panjang.

Jangka panjang ini dalam artian bahwa pengertian yang dibangun bukan sekadar penghafalan di ruang kelas tetapi sungguh menjadi visi hidup, pandangan hidup. Karena sesungguhnya materi Pancasila bukan merupakan sesuatu yang sempit dan statis. Materi pendidikan Pancasila merupakan sebuah proses dan dinamika terus menerus. Materi pendidikan Pancasila merupakan sebuah

perspektif yang luas karena Pancasila sendiri merupakan falsafah/filsafat<sup>71</sup> bangsa ini.

Dengan demikian tujuan jangka panjang pembelajaran ini pun perlu dicermati secara serius. Pancasila merupakan falsafah/filsafat bangsa ini, sebagai sebuah falsafah/filsafat maka metode membantu pemahaman materi dalam jangka panjang. Jangka panjang dalam konteks ini berarti metode ini membantu peserta didik memahami Pancasila dengan cara pandang yang lebih luas. Karena Pancasila bukan sebuah rumus bahkan Pancasila juga bukan ideologi negara tetapi ideologi nation.<sup>72</sup> Sukarno mengatakan bahwa Pancasila adalah weltanschauung. Bila filsafat senantiasa berkaitan dengan yang hakiki maka Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat tentu juga bergulat ditataran hakiki. Dimensi ini bukan sesuatu yang bisa selesai dalam jangka pendek namun merupakan sebuah dinamika jangka panjang.

Dalam dunia akademik pada umumnya dan proses pembelajaran pada khususnya sebuah metode adalah sarana untuk memahami pengetahuan atau materi pembelajaran. Sebuah metode yang baik sejauh ia dapat membantu manusia, membantu peserta didik mengerti dan memahami materi perkuliahan tetapi sekaligus bisa mengembangkan pengetahuan itu secara mandiri. Pertanyaan kemudian sejauh mana metode hermeneutika dan pendidikan nilai membantu mahasiswa memahami materi. Dari sebaran data tampak jelas bahwa persepsi mahasiswa untuk hal ini mengindikasikan ke arah positif. Ini berarti bahwa metode hermeneutika dan pendidikan nilai membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Hal ini bisa dilihat dari data dimana 17% responden menjawab metode ini sangat bermanfaat dan 68,5% mengatakan bahwa

---

<sup>71</sup> Di sini peneliti tidak ingin memisahkan antara falsafah dan filsafat karena kedua realitas ini sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Seringkali falsafah dimengerti sebagai pandangan hidup sedangkan filsafat sebagai sebuah studi sistimatis-kritis. Tetapi bila dicermati secara mendalam studi sistimatis kritis itu sendiri sesungguhnya juga tentang pandangan hidup. Pada saat pandangan hidup itu dijelaskan/dinarasikan maka sebuah sistem filsafat dengan sendirinya terbangun. Dari pertimbangan ini penulis berpandangan bahwa antara falsafah dan filsafat adalah kesatuan.

<sup>72</sup> Nation dalam konteks ini, Lihat penjelasan Mochtar Pabottinggi, Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik. Tulisan ini disampaikan pada Sarasehan dan Simposium “ Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, UGM Yogyakarta. Baginya nasion adalah kolektivitas politik dengan agenda politik makro bersama. Bdk. Proceeding Simposium, hlm. 164.

metode ini bermanfaat. Ini berarti lebih dari setengah jumlah responden memberi apresiasi pada metode ini. Sedangkan 13,6% mengatakan bahwa metode ini kurang baik, persepsi ini juga menyimpan sedikit dimensi positif dari. Responden yang secara total mengatakan bahwa metode ini tidak membantu memahami materi hanya sebesar 0,8%. Hal ini mengindikasikan sangat kecil persepsi negatif terhadap metode ini.

Metode perkuliahan menurut pengalaman peserta mata kuliah setelah mengikuti perkuliahan selama satu semester terlihat jelas ada pergeseran. Dari pengalaman peserta mata kuliah ini dapat disimpulkan bahwa metode yang dipakai menjawab situasi pendidikan Pancasila yang terlampaui indoktrinatif. Namun sekaligus metode ini perlu dikembangkan secara terus menerus sebagaimana juga yang diharapkan peserta didik. Sehingga metode ini semakin memudahkan pemahaman dan sanggup membangun pemaknaan tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Demikian juga pemahaman ini tidak hanya sekadar menjadi pemahaman, penghayatan dan pengamalan individual belaka tetapi menjadi pemahaman, penghayatan dan pengalaman kolektif sebagai bangsa.

### **C. Pandangan Atau Tanggapan Responden Terhadap Dosen MK Pendidikan Pancasila**

Pada bagian ini kami akan membahas tiga aspek penting tentang dosen yang mengajar MK Pendidikan Pancasila. Ketiga aspek tentang dosen tersebut adalah 1) mengajar secara monoton atau tidak, 2) membantu mahasiswa dalam memahami materi atau tidak, dan 3) dalam mengajar interaktif atau tidak. Kami akan membahas ketiga aspek tersebut berdasarkan deskripsi data penelitian pada bab sebelumnya..

#### **1. Dosen yang mengajar apakah monoton atau tidak.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 1) Cara dosen mengajar materi Pendidikan Pancasila dengan cara sangat monoton sebanyak 2 %
- 2) Monoton sebanyak 26 %,
- 3) Kurang monoton sebanyak 40 %, dan
- 4) Tidak monoton sebanyak 32 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Data di atas memperlihatkan mayoritas responden menjawab bahwa cara dosen MK Pendidikan Pancasila mengajar kurang monoton, yaitu sebesar 40 % dari total responden. Bila diakumulasikan pilihan jawaban yang positif, artinya yang memilih kurang monoton dan tidak monoton, terlihat jumlah yang sangat signifikan, yaitu sebesar 72 %. Hal ini menunjukkan bahwa bagi mayoritas responden tidak ada masalah dalam cara dosen menyampaikan materi. Mereka beranggapan bahwa dosen sangat fleksibel, cukup dialogis, dan dinamis dalam mengajar.

Pendalaman lebih lanjut terhadap aspek ini menghasilkan beberapa informasi penting yang berkaitan dengan anggapan responden tentang cara dosen mengajar yang tidak monoton, yaitu :

1. Materi yang diberikan tidak terpaku atau berasal dari satu sumber saja, yaitu dari buku ajar Pendidikan Nilai Pancasila. Penggunaan banyak sumber ini memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka tentang Pancasila itu sendiri, baik menyangkut sejarah, ideologi, maupun pengertiannya sebagai nilai.
2. Dosen dalam mengajar menggunakan banyak contoh yang membangun pemahaman mereka terhadap materi. Teristimewa contoh-contoh yang diberikan dibumbui sedikit cerita jenaka yang dapat menyegarkan pikiran mereka dalam mengikuti kuliah.
3. Tidak monoton juga terlihat dari intonasi yang diperlihatkan dosen ketika mengajar. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa suara yang cukup lantang dan jelas dalam mengajar dengan dinamika yang teratur menambah minat tersendiri bagi mereka dalam perkuliahan.

4. Selain ketiga hal di atas, mengajar yang tidak monoton menurut responden erat kaitannya juga dengan metode yang digunakan. Menurut mereka metode ceramah, yang disertakan dengan diskusi kelompok, menonton film, dan presentasi makalah atau laporan merupakan bentuk yang sangat baik dari cara menyampaikan materi. Metode ini dianggap dapat membunuh kebosanan yang seringkali menyerang dan menghantui mahasiswa. Terutama ketika mereka berhadapan dengan mata kuliah yang dianggap kandungan teori dan konsepnya lebih besar dalam materi yang diajarkan. Beberapa juga responden beranggapan semakin banyak diskusi dan menonton film malah menjadi lebih baik.

## **2. Dosen membantu mahasiswa memahami materi atau tidak.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 1) Dalam mengajar dosen sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan Pancasila sebanyak 22 %
- 2) Membantu sebanyak 69 %,
- 3) Kurang membantu sebanyak 8 %, dan
- 4) Tidak membantu sebanyak 1 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Data di atas memperlihatkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 69 % berpendapat bahwa dosen yang mengajar MK Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa dalam memahami materi Pendidikan Pancasila. Bila dikuantifikasi secara keseluruhan akan terlihat pendapat mayoritas responden memandang secara positif, yang memilih dalam mengajar dosen sangat membantu dan membantu, yaitu sebesar 91 %. Data ini sangat signifikan mengingat lebih dari 90 % responden menganggap bahwa dalam mengajar dosen membantu mahasiswa untuk memahami materi Pendidikan Pancasila.

Pandangan atau anggapan bahwa dalam menyampaikan materi dosen membantu mahasiswa dalam memahami materi didorong atau didukung oleh beberapa alasan atau faktor, yaitu :

1. Dosen sangat fokus dan detail dalam menjelaskan materi dan berusaha sungguh-sungguh menjelaskan apa arti atau makna dari sesuatu yang dijelaskan tersebut. Ketika mahasiswa belum memahami apa yang dimaksudkan, dosen berusaha menjelaskan lagi sampai mahasiswa sungguh mengerti dan memahami materi tersebut.
2. Dosen menggunakan contoh-contoh yang mudah dimengerti oleh mahasiswa untuk menjelaskan atau memperkaya materi yang diajarkan. Contoh-contoh real yang digunakan, yaitu yang berhubungan dengan fenomena dan kenyataan sosial masyarakat Indonesia sangat membantu mahasiswa untuk memahami materi yang sedang diajarkan.
3. Pemahaman terhadap materi juga erat berhubungan dengan metode yang digunakan. Metode exposure (tindakan lapangan) dalam bentuk laporan, refleksi dan analisis film, diskusi kelompok sangat membantu mereka untuk semakin memahami materi yang diberikan.

### **3. Dosen interaktif atau tidak dalam mengajar.**

Berdasarkan deskripsi data di atas terlihat bahwa jumlah responden yang mengikuti MK Pendidikan Pancasila yang menjawab :

- 5) Cara dosen mengajar atau menyampaikan materi Pendidikan Pancasila sangat interaktif sebanyak 27 %
- 6) Interaktif sebanyak 64,5 %,
- 7) Kurang interaktif sebanyak 8 %, dan
- 8) Tidak interaktif sebanyak 0,5 %.

dari total 381 responden yang menjadi sampel penelitian.

Data di atas memperlihatkan mayoritas responden berpendapat bahwa cara dosen mengajar atau menyampaikan materi interaktif, yaitu sebesar 64,5 %. Bila digabungkan dengan pilihan pertama, sangat interaktif, akan terlihat angka yang



sangat signifikan yang menganggap atau memandang secara positif cara dosen berinteraksi dalam mengajar, yaitu sebesar 91,5 %.

Ada beberapa alasan yang memperkuat pandangan atau pendapat di atas, yaitu:

1. Dosen tidak kaku dalam mengajar, melainkan selalu berdialog dengan mahasiswa dalam membahas atau mengajarkan materi kuliah.
2. Dosen juga mengajak keterlibatan mahasiswa lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa di dalam kelas, dan mahasiswa diajak untuk berpikir dan menganalisis sebuah persoalan yang menjadi pokok pembahasan.
3. Dosen tidak "jaim" (jaga image) atau mempertahankan kewibawaannya, melainkan mau bergaul dengan mahasiswa.
4. Di kelas dosen-dosennya mau berguyonan atau berkelakar dengan mahasiswa, tidak membuat suasana kelas menjadi tegang dan membosankan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan.**

Kesimpulan yang dibuat disini berhubungan dengan tiga pertanyaan penelitian yang dikemukakan di depan. Ketiga pertanyaan tersebut kemudian menemukan jawabannya dalam penelitian. Kesimpulan dari penelusuran dan penelitian terhadap tiga aspek, yaitu materi, metode, dan dosen akan kami uraikan di bawah ini.

#### **1. Materi Pendidikan Pancasila**

Berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila, mayoritas responden mempunyai pandangan yang senada, yaitu bahwa materi Pendidikan Pancasila itu menarik untuk dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan mereka dalam masyarakat. Fakta ini jelas meruntuhkan anggapan mereka di awal yang mengatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila itu tidak menarik dan tidak memiliki relevansi dengan keilmuan yang mereka pelajari. Kesan umum yang dapat kami simpulkan berkaitan dengan materi adalah bahwa materi perkuliahan yang dikemas secara menarik akan menarik minat mahasiswa juga dalam perkuliahan.

Mayoritas mahasiswa mengatakan bahwa ketertarikan mereka untuk mempelajari Pancasila terutama karena Pendidikan Pancasila di kemas dengan menggunakan pendekatan filsafat. Bagi kebanyakan dari mereka, filsafat adalah sebuah wilayah baru yang mereka kenal dan masuki. Mereka merasa tertantang untuk mempelajarinya, meskipun materi filsafat sangat sedikit dipakai dalam pengajaran. Tetapi penggunaan metode filsafat, terutama hermeneutika, memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka tentang kehidupan mereka sendiri. Apalagi metode filsafat membantu mereka untuk memiliki daya kritis dan kebebasan untuk berpikir tanpa rasa takut akan apapun.

Pendekatan filsafat ini sekaligus merupakan sebuah usaha deindoktrinasi dan deideologisasi terhadap Pancasila. Bagi mahasiswa, pengalaman mempelajari Pancasila sejak di Sekolah Dasar diperkaya melalui sebuah pendekatan kritik-analitis yang diperlihatkan melalui perkuliahan Pendidikan Pancasila di Unpar. Mahasiswa menganggap bahwa usaha kritik ideologi yang diterapkan lewat materi perkuliahan Pendidikan Pancasila menantang mereka untuk juga semakin memahami dan menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka yang konkret.

## **2. Metode kuliah Pendidikan Pancasila.**

Metode merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Metode yang baik akan menciptakan suasana pembelajaran yang menggairahkan dan hidup. Pada penelitian pertama peserta didik lebih banyak bersikap netral dan bahkan negatif terhadap metode pendidikan Pancasila yang selama ini dipelajari. Hal ini dapat dilihat data penelitian pertama peserta didik yang belum pernah mengikuti pelajaran ini mempersepsi pendidikan Pancasila diajarkan secara dialogis antara dosen dan mahasiswa hanya sebanyak 18,6 % dan yang pernah mengikuti 29,4%. Bila kita memahami metode yang interaktif sebagai sebuah cara pembelajaran yang menarik maka persepsi yang ada tidak ideal. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian lanjutan setelah para mahasiswa mengikuti pembelajaran selama satu semester jawaban kemudian bergeser dengan angka yang signifikan. Ketika ditanya soal menarik atau tidak pembelajaran maka secara kualitatif ada pergeseran yang signifikan menjadi 16,3% yang mengatakan sangat menarik dan 60,9% mengatakan metode yang dipakai menarik. Data ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, pembelajaran Pendidikan Pancasila ini bisa dijadikan sesuatu yang menarik dan hidup sejauh metode pengajaran terus diperbarui. Kedua, peserta didik yang umumnya orang muda seringkali dipandang tidak lagi peduli pada Pancasila, persepsi ini sungguh tidak mendasar manakala dibenturkan dengan kenyataan. Karena sesungguhnya yang tidak disenangi bukan Pancasila an sich tetapi cara pengajaran yang monolog. Dari sini perlu dirancang sebuah metode pembelajaran yang membantu pengajaran dan pembelajaran yang

lebih dialogis dan interaktif. Metode hermeneutika dan Pendidikan nilai merupakan salah satu metode yang menghidupkan suasana pembelajaran tersebut.

Sebuah metode yang baik harus membawa manfaat langsung dan tidak langsung bagi peserta didik untuk memahami materi. Seringkali dalam pembelajaran metode diabaikan metode dan orang hanya berkonsentrasi pada isi pembelajaran. Dari penelitian ini terlihat jelas apresiasi yang tinggi dari peserta didik terhadap metode, 11,3% sangat bermanfaat dan 76,6% menjawab bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa pilihan metode harus tepat karena tidak hanya isi yang bermanfaat tetapi juga metode berguna bagi peserta didik. Metode merupakan salah satu unsur yang ternyata mendapat perhatian serius dari peserta didik. Secara epistemologis metode merupakan salah satu unsur penting dinamika ilmu. Ladang telaahan atau obyek kajian ilmu bisa berbeda-beda namun dasar-dasar metode ilmu kurang lebih sama. Maka perhatian pada metode bukan suatu yang aksidental semata tetapi harus merupakan sesuatu yang juga prinsipil dalam proses pembelajaran.

Salah satu hal penting dalam pembelajaran yaitu memahami materi pembelajaran. Pemahaman merupakan sebuah proses yang berlangsung terus dalam kehidupan. Materi merupakan unsur kunci sebuah pembelajaran dan materi ini ingin dibagikan kepada peserta didik. Agar materi yang baik itu bisa sampai ke peserta didik maka metode menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Umumnya materi merupakan sesuatu yang mendasar sehingga terkesan rumit dan berat. Penekanan pada materi seringkali juga membuat orang mengabaikan metode agar materi tertentu bisa sampai kepada peserta didik. Pendek kata materi dipandang sebagai sesuatu yang utama sedangkan metode dipandang sebagai sesuatu yang pinggiran belaka. Pandangan ini perlu tinjau ulang, karena peserta didik ternyata menaruh perhatian dan merasa sangat terbantu dengan metode yang dipakai. Hal ini bisa dilihat dari tanggapan peserta didik yaitu sebanyak 17% berpendapat bahwa metode sangat membantu memahami materi dan 68,5% yang mengatakan metode perkuliahan membantu memahami materi. Dari sini sekali lagi ditegaskan bahwa metode merupakan unsur yang

perlu diperhatikan secara serius dalam proses pembelajaran. Karena pilihan metode yang cepat akan membantu pemahaman materi secara baik pula.

### **3 Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila**

Temuan penting yang dapat dikemukakan berkaitan dengan dosen adalah mahasiswa memandang interaksi dosen dengan mereka di kelas akan sangat membantu menumbuhkan minat mereka dalam perkuliahan. Para dosen Pendidikan Pancasila dalam pandangan mereka telah mampu membangun hubungan melalui interaksi yang seimbang dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Mahasiswa memandang bahwa interaksi dan komunikasi yang buruk antara dosen dan mahasiswa akan membangun penilaian buruk terhadap dosen yang bersangkutan. Interaksi yang baik menurut mereka adalah bila dosen mampu membangun hubungan yang akrab dan personal dengan mahasiswa. Yang dimaksudkan adalah dosen mampu menciptakan suasana dan situasi kelas yang mendukung pembelajaran. Misalnya lewat pertanyaan-pertanyaan pancingan dan provokatif yang menuntut kemampuan analitis mahasiswa. Selain interaksi juga dapat dibangun lewat gurauan dan candaan sehingga suasana kelas benar-benar menjadi medan pembelajaran yang *animasik*.

Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa Pancasila merupakan salah satu MKU yang baik. Salah satu alasannya adalah karena para dosennya terkenal baik dan mantap, meski sering radikal. Yang dimaksudkan dengan radikal adalah cara berpikir para dosen Pancasila sering keluar dari pandangan atau anggapan umum masyarakat tentang sebuah fenomena atau realitas. Meski demikian mahasiswa merasa bahwa cara berpikir semacam itu perlu untuk membangun atau membongkar kesadaran mereka akan sesuatu. Saran pokok mahasiswa adalah agar para dosen Pancasila harus lebih mem-Pancasilakan kaum muda, terutama lewat ajaran dan sikapnya.

## **B. Rekomendasi**

Dari keseluruhan penelitian ini peneliti mencoba untuk merekomendasikan beberapa hal menyangkut materi, metode, dan dosen, yaitu :

1. Materi Pendidikan Pancasila hendaknya selalu kontekstual, dalam arti selalu adanya kesesuaian dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dinamika kehidupan yang dimaksudkan adalah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia terbangun dari akar pluralitas yang sangat dalam sehingga menuntut kepekaan dan sentimen nasional yang tinggi untuk menjaga dan melindunginya. Kontekstualitas materi Pendidikan Pancasila dimaksudkan agar mahasiswa semakin memahami akar pluralitas tersebut. Pemahaman yang obyektif dan holistik tentang berbagai dimensi dan aspek yang membentuk bangunan Indonesia akan semakin membuka wawasan kebangsaan yang otentik. Dalam konteks ini mahasiswa diajak untuk merefleksikan dan memahami keindonesiaan dari sudut pandang keberagaman atau heterogenitas yang menjadi kenyataan paling konkret dan kodrati. Disebut kodrati karena perbedaan atau pluralitas itu bukan sesuatu yang diciptakan atau dikondisikan, melainkan sebuah eksisten yang tumbuh secara alami dan kodrati sebagai sebuah anugerah dan rahmat. Tidak ada satu manusiapun atau kelompok masyarakat manapun yang sanggup menyangkalinya apalagi meniadakannya. Karena itu, kontekstualitas materi Pendidikan Pancasila akan memungkinkan mahasiswa memahami bahwa perbedaan kultur, etnisitas, agama, adat-istiadat, golongan, ideologi, dsb., bukan saja sesuatu yang perlu untuk semakin mendewasakan personalitasnya, tetapi lebih dari itu adalah sebuah kodrat.
2. Hakekat dari pembelajaran adalah terbukanya keran-keran pengetahuan lewat proses pemahaman yang tercipta dalam pembelajaran tersebut. Outputnya adalah terintegrasinya nilai-nilai yang ditawarkan dalam pembelajaran dalam diri peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut

diperlukan pilihan metode yang tepat dan komprehensif. Metode pembelajaran dialog-interaktif adalah sebuah pilihan yang sangat ideal dan representatif. Dalam persepektif konstruktifisme metode ini menciptakan hubungan subyek-subyek antara pendidik dan peserta didik, dalam hal ini antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa adalah subyek didik dan karena itu merupakan pusat dari proses pembelajaran tersebut. Dalam konteks ini model pembelajaran adalah *student-center*. Artinya mahasiswa adalah sentrum dari keseluruhan proses pembelajaran. Dosen adalah fasilitator atau mediator yang membantu mahasiswa untuk memahami berbagai masalah dan menyelesaikannya secara kritis dan analitis. Dalam konteks ini perlu terus dipertahankan metode pembelajaran dialogis, yaitu lewat diskusi, analisis film, ekskursi / observasi lapangan, presentasi *portofolio*, yang selama ini menjadi bagian integral dari pembelajaran Pancasila. Meski demikian pengembangan metode pembelajaran perlu terus-menerus dilakukan demi semakin meningkatkan kualitas dan ketercapaian pembelajaran. Salah satunya yang menarik adalah metode pembelajaran *luar kelas*. Yang dimaksudkan di sini adalah model pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang ada misalnya kunjungan ke museum atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Selain itu juga menggunakan metode pembelajaran *e-learning* dengan memanfaatkan jejaring internet untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran, misalnya dalam bentuk program mahasiswa bertanya dosen menjawab, atau membantu mahasiswa dalam mengumpulkan tugas, dsb.

3. Para dosen Pendidikan Pancasila perlu mempertahankan model hubungan personal antara dosen dan mahasiswa. Maksudnya adalah bahwa dosen setidaknya-tidaknya mengenal situasi dan kondisi mahasiswa di setiap kelasnya dan berusaha sedapat mungkin menyapa mereka secara pribadi. Hubungan macam ini akan memungkinkan terbangunnya sikap terbuka dan saling percaya tanpa mereduski rasa hormat mahasiswa terhadap

dosennya. Interaksi yang harmonis antara dosen dan mahasiswa akan mampu membangun situasi dan suasana pembelajaran yang lebih baik. Hubungan personal lewat interaksi yang intensif antara dosen dan mahasiswa di kelas juga dapat membantu mengarahkan mahasiswa untuk memiliki pemahaman dan cara pandang yang sesuai dengan sasaran dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Pola hubungan dialektis semacam ini memungkinkan juga pengkayaan pengetahuan antara dosen dan mahasiswa. Hal ini juga akan memudahkan komunikasi antara dosen sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai anak didik. Dalam konteks ini, dosen menjadi seorang 'guru'. Fungsinya tidak saja mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi sekaligus sebagai model dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku bagi mahasiswa. Fungsi pendidik inilah yang semestinya dibangun dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa di kelas.



## DAFTAR PUSATAKA

- Buyung Nasution, Adnan, *Apirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-195, Pusataka Utama Grafis :, Jakarta*
- Dahm, Bernard, 1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3S : Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, (1994), *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, Malang : Lab. Pancasila IKIP Malang
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (2003), *Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*, Jakarta : Depdiknas.
- Djahiri, A. Kosasih, (1985), *Strategi Belajar Mengajar Afeksi Model Belajar Mengajar*, Bandung : Graesia
- Doweng Bolo, Andreas, (2006), *Pendidikan Nilai Pancasila*, Bandung, Unpar Press
- , (2009), *Persepsi Awal Peserta Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terhadap Pendidikan Pancasila di UNPAR*, Bandung : hasil penelitian
- Hartoko, Dick, (1985), *Memanusiaikan Manusia Muda; Tinjauan Pendidikan Humaniora*, Yogyakarta : Kanisius & Jakarta : BPK Gunung Muli
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945-Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Pusataka : Bandung.
- Isya, Warlim, (2003), *Pendidikan Pancasila Sebagai Pendidikan Umum* dalam "Jurnal Kajian Pendidikan Umum", Bandung : Value Press
- Leksono-Supelli, Karlina, dalam J. Drost, SJ. (ed), *Arah Pembangunan – Desentralisasi Pengajaran – Politik dan Konsensus*.
- Magnis-Suseno, Franz, 1987, *Etika Politik-Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia : Jakarta.
- *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius : Yogyakarta.

- Mulder, Niels, 2001, *Individu Masyarakat dan Sejarah-Kajian Kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia*, (Hasil Penelitian), Kanisius : Yogyakarta.
- , 2003, *Wacana Publik Indonesia*, terj. A. Widyamartaya dkk., Kanisius : Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., (1991), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : P3T Depdikbud.
- Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara, dan Sumber Hukum*, CSIS : Jakarta.
- Riduwan, 2005, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru – Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung : Alfabeta.
- Samego, Indria (et.al.), *Bila ABRI Menghendaki*, LIPI : Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*
- Smith, Anthony D., *Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah*, terj. Frans Kowa, Erlangga: Jakarta.
- Soekarno, 1964, *Tjatkan Pantja Sila - Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, Panitia Nasional Pertingatan Lahirnya Pancasila : Jakarta.
- Sumaatmadja, Nursid, (2003), *Pemanusiaan Manusia Manusiawi*, bandung : Alfabet
- Sudjana, Nana & Ibrahim, 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*.
- Wardaya, Baskara T., 2006, *Bung Karno Menggugat-dari Marhaen, Pembantaian Massal '65 hingga G30 S*, Galang Press : Yogyakarta.
- Warman Adam, Asvi, 2007, *Seabad Kontroversi Sejarah*, Ombak : Jakarta.